PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN GORONTALO

SKRIPSI

AIP PRATIKTO HUNOWU
NIM: D01425008

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2026

PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN GORONTALO

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Wajib Dalam Menyelesaikan Jenjang Pendidikan Sarjana

AIP PRATIKTO HUNOWU
NIM: D01425008

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2026

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya menyatakan bahwa Hasil penelitian yang berjudul ***Pengaruh Kebijakan Fiskal Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo*** adalah karya saya dibawah arahan dari pembimbing. Skripsi ini belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun dan bebas dari unsur plagiat. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka dibagian akhir hasil penelitian ini. Apabila di kemudian hari ditemukan unsur-unsur plagiat maka saya bersedia menerima sanksi hukum dan sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Gorontalo, Oktober 2026



AIP PRATIKTO HUNOWU
NIM. D01425008

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Joice Mahmud, SE, MM	Sri Hantuti Paramata, SE, M.Pd
NIDN. 0927037401	NIDN. 0921036404
Tanggal:	Tanggal:

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial	Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Dr. Apris Ara Tilome, S.Ag, M.Si	Sri Hantuti Paramata, SE, M.Pd
NIDN: 0931088901	NIDN. 0921036404
Tanggal:	Tanggal:

Nama	: Aip Pratikto Hunowu
NIM	: D01425008
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Penelitian : Pengaruh Kebijakan Fiskal Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo
Nama : Aip Pratikto Hunowu
NIM : D01425008
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

KOMISI PENGUJI

1. Ramlah Alkatiri, SE, M.Si (.....)
2. Joice Machmud, SE, MM (.....)
3. Sri Hantuti Paramata, SE, M.Pd (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial	Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Dr. Apris Ara Tilome, S.Ag., M.Si	Sri Hantuti Paramata, SE, M.Pd
NIDN: 0916017402	NIDN: 0921036404

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

" Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."
(QS. Al-Insyirah: 5–6)

"Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan Adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha dan pantang menyerah."
(AIP)

PERSEMBAHAN:

Persembahan dan Dharma Baktiku ini Untuk:

Sembah sujud serta Syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan ridho dan rahmatnya, memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu, serta karunia kemudahan hingga akhirnya hasil penelitian ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kusembahkan karya sederhanaku ini kepada orang yang sangat kukasih dan kusayangi

Kedua orang tuaku tercinta terutama (Alm) ayah Abd. Rahman Hunowu yang raganya telah berpulang ke keabadian, namun untaian doa, didikan luhur, dan cinta kasihnya semasa hidup tak pernah padam. dan ibuku tercinta Sumiaty Putu, terima kasih sang pelita hati yang detak doanya selalu mengetuk pintu langit, memelukku dalam keikhlasan yang tak bertepi.

Teruntuk istriku tercinta, Suryan Buntuang, bidadari dunia yang dengan kelembutan, kesabaran, dan ketulusan cintanya selalu setia mendekapku di kala badai ujian datang. Pendamping jiwa dan rela berbagi Lelah, melipat jarak kesedihan menjadi senyuman hangat penyejuk jia.

Kepada anak-anakku Mutiara hatiku Reza dan Reva, kalian Adalah alasan terindah di balik setiap hela napas perjuangan ini, senyum dan binar mata kalian Adalah energi yang mematahkan kata menyerah. Karya ini ayah persembahkan sebagai bukti cinta dan pijakan masa depan yang indah untuk kalian.

Terima kasih untuk dosen Penasehat Akademik (PA) sekaligus sebagai dosen pembimbing Ibu Joice Machmud, SE, MM yang luar biasa, terima kasih atas ketulusan hati, kearifan ilmu, dan kesabaran tiara tara dalam menuntun Langkah akademisku. Bimbingan ibu bukan sekedar coretan pena melainkan titian ilmu masa depanku.

Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan, untaian cerita, gelak tawa, dan uluran tangan kalian sepanjang jalan sunyi ini akan selalu menjadi lembaran kenangan indah yang abadi dalam ingatan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Swt yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

Skripsi dengan judul "Pengaruh Kebijakan Fiskal Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo" ini, tentunya tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu izinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Kadim Masaong, M.Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo;
2. Dr. Muh. Firyal Akbar, S.IP, M.Si, Wakil Rektor I Bidang Akademik;
3. Dr. H. Salahudin Pakaya, S.Ag, MH, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan;
4. Dr. Thamri A. Kum, M.Pd, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan;
5. Dr. Apris Ara Tilome, S.Ag, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo;
6. Sri Hantuti Paramata, SE, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan sekaligus Pembimbing 2;
7. Joice Machmud, SE, MM, Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, motivasi, masukan-masukan, nasehat, dan saran yang sangat berguna bagi penulis;
8. Ramlah Alkatiri, SE, M.Si, Dosen Penguji yang telah banyak memebrikan saran serta masukan dalam penyusunan hasil penelitian ini;
9. Pimpinan dan Staf Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Gorontalo;
10. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo khususnya Program Studi Ekonomi Pembangunan, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan petunjuk dan arahan demi kesempurnaan hasil penelitian ini. Semoga semua amal kebaikan pihak-pihak sebagaimana tercantum diatas mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt.

Gorontalo, Oktober 2026

Penulis

ABSTRAK

AIP PRATIKTO HUNOWU. Pengaruh Kebijakan Fiskal Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo. Dibimbing oleh sebagai **JOICE MACHMUD** Pembimbing I dan **SRI HANTUTI PARAMATA** sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo dengan memfokuskan kebijakan fiskal pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sisi penerimaan dan Belanja Modal sebagai sisi pengeluaran daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori dan memanfaatkan data sekunder berbentuk deret waktu periode 2015–2025. Data PAD dan Belanja Modal bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sedangkan data pertumbuhan ekonomi bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo. Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki arah pengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai signifikansi 0,425. Belanja Modal juga memiliki arah pengaruh positif, tetapi tidak signifikan dengan nilai signifikansi 0,947. Secara simultan, PAD dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, ditunjukkan oleh nilai F sebesar 0,455 dan signifikansi 0,650. Kedua instrumen fiskal tersebut hanya mampu menjelaskan 10,2 persen variasi pertumbuhan ekonomi, sedangkan 89,8 persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, kebijakan fiskal daerah yang direpresentasikan melalui PAD dan Belanja Modal selama periode penelitian belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan daerah dan besarnya pengeluaran modal belum dengan sendirinya menghasilkan respons pertumbuhan ekonomi dalam periode yang sama, sehingga efektivitas pemanfaatan kapasitas fiskal dan ketepatan alokasi Belanja Modal pada kegiatan produktif menjadi penting dalam memperkuat kontribusi kebijakan fiskal terhadap perekonomian daerah.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Belanja Modal; Pertumbuhan Ekonomi; Kabupaten Gorontalo.

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ii
PENGESAHAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 6
1.3 Rumusan Masalah 7
1.4 Tujuan Penelitian 7
1.5 Manfaat Penelitian 7
1.5.1 Manfaat Teoretis 7
1.5.2 Manfaat Praktis 8
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN 9
2.1 Kajian Teoritis 9
2.1.2 Desentralisasi Fiskal 9
2.1.2 Kebijakan Fiskal Daerah 16
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 27
2.1.4 Belanja Modal 37
2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi 48
2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 58
2.3 Kerangka Berpikir 60
2.4 Hipotesis Penelitian 61
BAB III METODE PENELITIAN 62
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 62
3.2 Desain Penelitian 62
3.3 Variabel dan Definisi Operasional Penelitian 63
3.3.1 Variabel Penelitian 63
3.3.2 Definisi Operasional Variabel 63
3.4.1 Populasi 64
3.4.2 Sampel 64
3.5 Jenis dan Sumber Data 64
3.5.1 Jenis Data 64
3.5.2 Sumber Data 65
3.6 Prosedur Pengumpulan Data 65
3.7 Teknik Analisis Data 66

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif 66
3.7.2 Uji Asumsi Klasik 66
3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda 67
3.7.4 Uji Hipotesis 68
3.7.5 Koefisien Determinasi (R^2) 68
3.8 Hipotesis Statistik 68
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 70
4.1 Hasil 70
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Gorontalo 70
4.1.2 Analisis Statistik 75
4.2 Pembahasan 84
4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo 84
4.2.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo 86
4.2.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo 89
BAB V PENUTUP 92
5.1 Kesimpulan 92
5.2 Saran 93
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Kajian Penelitian yang Relevan 59
Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 62
Tabel 3. Definisi Operasional Variabel Penelitian 63
Tabel 4. Struktur PDRB Kabupaten Gorontalo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2025 72
Tabel 5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Kabupaten Gorontalo Tahun 2015–2025 (dalam miliar rupiah) 73
Tabel 6. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 75
Tabel 7. Hasil Uji Normalitas 76
Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas 77
Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Glejser) 77
Tabel 10. Hasil Uji Autokorelasi 78
Tabel 11. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 79
Tabel 12. Hasil Koefisien Determinasi (R^2) 80
Tabel 13. Hasil Uji Parsial (Uji t) 81
Tabel 14. Hasil Uji Simultan (Uji F) 83

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Tren Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 – 2025 2
Gambar 2. Tren Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015– 2025 3
Gambar 3. Tren Belanja Modal Kabupaten Gorontalo Tahun 2015–2025 4
Gambar 4. Kerangka Berpikir 60

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup 98
Lampiran 2. Master Data (Data Sekunder)..... 99
Lampiran 3. Output SPSS..... 100
Lampiran 4. SK Dosen Pembimbing 111
Lampiran 5. Surat Permohonan Ijin Penelitian 113
Lampiran 6. Rekomendasi Penelitian/Kesbangpol 114
Lampiran 7. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian 115
Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian..... 116

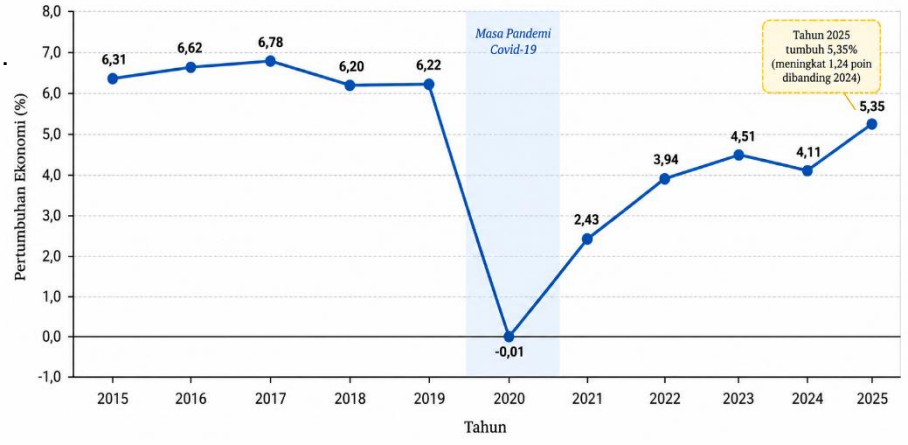
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah karena mencerminkan kemampuan perekonomian dalam meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa secara berkelanjutan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi umumnya diikuti oleh meningkatnya aktivitas produksi, investasi, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat sehingga menjadi sasaran penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Menurut teori pertumbuhan neoklasik, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi (Solow, 1956). Sementara itu, teori pertumbuhan endogen menjelaskan bahwa investasi pada modal fisik, modal manusia, inovasi, serta kebijakan publik yang efektif dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Romer, 1990). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga mencerminkan efektivitas kebijakan pembangunan dalam menciptakan perekonomian daerah yang produktif, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo terus berupaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika perekonomian nasional maupun regional. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo pada tahun 2025 mencapai 5,35 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 4,11 persen. Meskipun menunjukkan tren pemulihan setelah perlambatan akibat pandemi Covid-19, struktur perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sehingga pertumbuhan ekonomi relatif dipengaruhi oleh perkembangan sektor primer. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi memerlukan kebijakan pembangunan yang mampu memperkuat kapasitas ekonomi daerah, meningkatkan produktivitas sektor-sektor

potensial, serta mendorong diversifikasi ekonomi sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan.



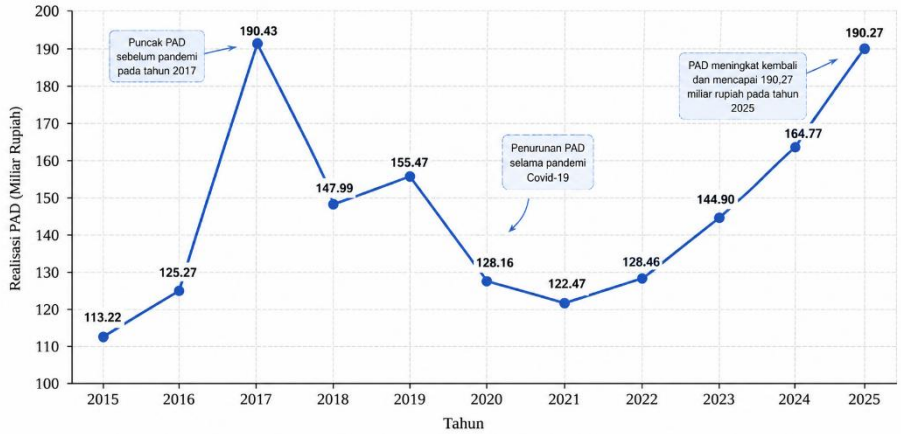
Gambar 1. Tren Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo Tahun 2015–2025
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo (2026), diolah.

Berdasarkan Gambar 1, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo selama periode 2015–2025 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo selama periode 2015–2025 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada periode 2015–2019, pertumbuhan ekonomi relatif stabil sebelum mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi. Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian, pertumbuhan ekonomi mulai pulih sejak tahun 2021 dan terus meningkat hingga mencapai 5,35 persen pada tahun 2025. Meskipun demikian, laju pertumbuhan tersebut masih menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sehingga diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu faktor yang diyakini berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah adalah kebijakan fiskal pemerintah daerah. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah memiliki instrumen untuk menghimpun pendapatan serta mengalokasikan belanja guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, penyediaan pelayanan publik, dan pembangunan ekonomi. Dalam era desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Menurut teori *Fiscal Federalism*, desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien karena

keputusan fiskal dibuat lebih dekat dengan masyarakat yang menerima manfaatnya (Oates, 1972). Efektivitas kebijakan tersebut bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan dan belanja secara optimal sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Oates, 1999).

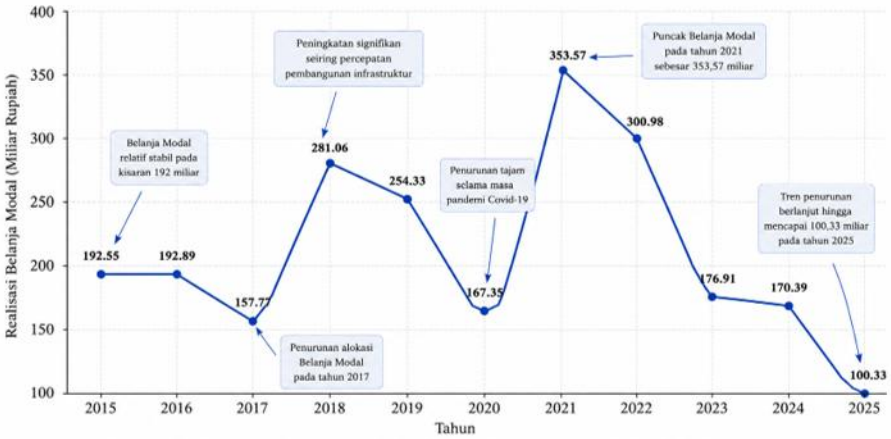
Salah satu indikator utama yang mencerminkan kapasitas fiskal pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Peningkatan PAD menunjukkan semakin besarnya kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat. Dengan kapasitas fiskal yang lebih baik, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk menyediakan pelayanan publik, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, besarnya PAD belum tentu secara langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila pengelolaannya belum dilakukan secara efektif dan diarahkan pada program-program pembangunan yang produktif (Martinez-Vazquez & McNab, 2003). Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo menunjukkan adanya dinamika kapasitas fiskal pemerintah daerah selama periode penelitian. Perubahan nilai PAD dari tahun ke tahun mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan yang bersumber dari aktivitas ekonomi lokal.



Gambar 2. Tren Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015–2025
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI (2026), diolah dari Realisasi APBD Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan Gambar 2, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo selama periode 2015–2025 menunjukkan kecenderungan meningkat meskipun mengalami fluktuasi pada beberapa tahun. Realisasi PAD meningkat dari Rp113,22 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp190,27 miliar pada tahun 2025. Penurunan penerimaan terjadi pada periode pandemi Covid-19, khususnya tahun 2020 dan 2021, sebelum kembali mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Namun demikian, peningkatan PAD belum tentu secara langsung diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi karena efektivitasnya sangat bergantung pada pengelolaan dan pemanfaatannya dalam membiayai program-program pembangunan yang produktif.

Selain kemampuan menghimpun pendapatan, efektivitas kebijakan fiskal daerah juga ditentukan oleh kualitas alokasi belanja pemerintah, terutama Belanja Modal. Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap, seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur publik lainnya. Alokasi belanja tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat konektivitas wilayah, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, Belanja Modal dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.



Gambar 3. Tren Belanja Modal Kabupaten Gorontalo Tahun 2015–2025
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI (2026), diolah dari Realisasi APBD Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan Gambar 3, realisasi Belanja Modal Kabupaten Gorontalo selama periode 2015–2025 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Belanja Modal mengalami peningkatan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar Rp353,57 miliar, kemudian menurun pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai Rp100,33 miliar pada tahun 2025. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa alokasi belanja pembangunan belum berlangsung secara konsisten. Di sisi lain, perkembangan PAD, Belanja Modal, dan pertumbuhan ekonomi selama periode penelitian juga tidak selalu menunjukkan pola yang searah. Pada beberapa tahun, peningkatan PAD tidak diikuti oleh peningkatan Belanja Modal maupun pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada periode lainnya pertumbuhan ekonomi tetap meningkat meskipun Belanja Modal menurun. Fenomena ini mengindikasikan bahwa hubungan antara kapasitas fiskal daerah, alokasi Belanja Modal, dan pertumbuhan ekonomi tidak bersifat sederhana, sehingga memerlukan pengujian empiris untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo.

Hubungan antara kebijakan fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian. Badrudin dan Kuncorojati (2017) menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan kapasitas keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, Putra dan Yasa (2019) membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Hasil yang sejalan juga ditemukan oleh Saputra, Haliah, dan Indrijawati (2021), Tuwo, Rotinsulu, dan Kawung (2021), serta Makawaehe, Walewangko, dan Sumual (2023), yang menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal dan alokasi Belanja Modal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Secara umum, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun besarnya pengaruh dipengaruhi oleh karakteristik fiskal, struktur ekonomi, dan kualitas pengelolaan keuangan pada masing-masing daerah.

Meskipun berbagai penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, hasil penelitian tersebut umumnya diperoleh dari daerah dengan karakteristik fiskal, struktur ekonomi, dan kapasitas pembangunan yang berbeda dengan Kabupaten

Gorontalo. Selain itu, sebagian besar penelitian menggunakan periode pengamatan yang belum mencakup dinamika sebelum pandemi, masa pandemi Covid-19, dan periode pemulihan ekonomi secara utuh. Padahal, perubahan kondisi ekonomi pada periode tersebut berpotensi memengaruhi hubungan antara kapasitas fiskal daerah, alokasi Belanja Modal, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengkaji kembali pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo menggunakan data periode 2015–2025 agar diperoleh bukti empiris yang lebih mutakhir dan sesuai dengan karakteristik daerah.

Penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih spesifik dengan memfokuskan analisis pada pengaruh Pendapatan Asli Daerah sebagai indikator kapasitas fiskal dan Belanja Modal sebagai representasi pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya dilakukan pada wilayah atau periode yang berbeda, penelitian ini menggunakan data deret waktu tahun 2015–2025 yang mencakup kondisi sebelum pandemi, masa pandemi, dan periode pemulihan ekonomi. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang lebih komprehensif mengenai peran kebijakan fiskal daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi pada tingkat kabupaten.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah pokok yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo selama periode 2015–2025 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kondisi pertumbuhan ekonomi yang stabil.
2. Kapasitas fiskal daerah yang tercermin melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta alokasi belanja produktif yang direpresentasikan oleh Belanja Modal belum menunjukkan perkembangan yang konsisten dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo.
3. Belum diketahui secara empiris sejauh mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo selama periode 2015–2025.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan fiskal daerah dari sisi penerimaan yang direpresentasikan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo?
2. Apakah kebijakan fiskal daerah dari sisi pengeluaran yang direpresentasikan melalui Belanja Modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo?
3. Apakah kebijakan fiskal daerah yang direpresentasikan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan fiskal daerah dari sisi penerimaan yang direpresentasikan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan fiskal daerah dari sisi pengeluaran yang direpresentasikan melalui Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo.
3. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan fiskal daerah yang direpresentasikan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut.

1.5.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ekonomi publik, ekonomi regional, dan keuangan daerah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, serta menjadi

referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas kebijakan fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat pemerintah daerah.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan fiskal daerah, khususnya dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengalokasian Belanja Modal yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Bagi Universitas

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah di bidang ekonomi pembangunan, ekonomi publik, dan keuangan daerah, serta menjadi bahan kajian bagi mahasiswa dan dosen dalam pengembangan penelitian yang relevan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang mengkaji hubungan antara kebijakan fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi, baik dengan menggunakan variabel, objek, maupun metode analisis yang berbeda.

BAB II
TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kajian Teoritis

2.1.2 Desentralisasi Fiskal

a. Pengertian Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan. Dalam perspektif keuangan publik, desentralisasi fiskal tidak hanya dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan administratif, tetapi juga sebagai pemberian ruang bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan fiskal sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayahnya (Musgrave, 1959; Oates, 1972). Konsep tersebut berlandaskan teori *Fiscal Federalism* yang dikembangkan Oates (1972), yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki keunggulan dalam memahami preferensi masyarakat lokal sehingga mampu mengalokasikan sumber daya publik secara lebih efisien. Efektivitas desentralisasi fiskal selanjutnya bergantung pada kemampuan pemerintah daerah mengoptimalkan instrumen fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang responsif (Oates, 1999).

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan desentralisasi fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menegaskan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam hubungan keuangan antarpemerintah. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal menjadi landasan konseptual yang menjelaskan kewenangan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dan mengalokasikan Belanja Modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

b. Tujuan Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pembagian kewenangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemberian kewenangan tersebut memungkinkan pemerintah daerah mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Dengan

demikian, kebijakan fiskal yang dihasilkan diharapkan menjadi lebih responsif terhadap permasalahan lokal dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan (Oates, 1972; Musgrave, 1959).

Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya publik. Menurut Oates (1972), pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah pusat, sehingga lebih mampu menentukan prioritas pembangunan secara tepat. Melalui kewenangan tersebut, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Efisiensi alokasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan daerah sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Selain meningkatkan efisiensi, desentralisasi fiskal juga bertujuan memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Kemandirian fiskal tercermin dari kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Semakin tinggi kemampuan daerah menghimpun pendapatan secara mandiri, semakin besar fleksibilitas pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat (Bird & Vaillancourt, 1999; Halim, 2020).

Tujuan berikutnya adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kedekatan pemerintah daerah dengan masyarakat diharapkan mendorong pengawasan publik yang lebih efektif terhadap proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Kondisi tersebut akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, serta mendorong penggunaan anggaran yang lebih efisien dan bertanggung jawab (Mahmudi, 2019; Republik Indonesia, 2022).

Dalam konteks Indonesia, tujuan desentralisasi fiskal juga diarahkan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan hubungan keuangan yang adil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut ditegaskan

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa hubungan keuangan diselenggarakan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mendukung pelayanan publik dan pembangunan yang berkelanjutan (Republik Indonesia, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan desentralisasi fiskal tidak hanya terbatas pada pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah, tetapi juga mencakup peningkatan efisiensi alokasi anggaran, penguatan kemandirian fiskal, peningkatan akuntabilitas, serta pemerataan pembangunan. Dalam penelitian ini, tujuan tersebut menjadi dasar konseptual untuk menjelaskan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan pengalokasian Belanja Modal sebagai instrumen fiskal yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo.

c. Prinsip-prinsip Desentralisasi Fiskal

Pelaksanaan desentralisasi fiskal tidak hanya didasarkan pada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi juga harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang menjamin efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tujuan desentralisasi fiskal dapat tercapai secara optimal. Dalam literatur Fiscal Federalism maupun regulasi di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut menekankan keseimbangan antara kewenangan, tanggung jawab, dan kapasitas fiskal pemerintah daerah (Musgrave, 1959; Oates, 1972).

Secara umum, prinsip-prinsip desentralisasi fiskal dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Prinsip Efisiensi

   Prinsip efisiensi menekankan bahwa pengalokasian sumber daya publik harus menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan penggunaan anggaran yang optimal. Pemerintah daerah diharapkan mampu menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lokal sehingga pengeluaran daerah menjadi lebih efektif dibandingkan apabila seluruh keputusan dilakukan secara terpusat (Oates, 1972).

2. Prinsip Akuntabilitas

   Prinsip akuntabilitas mengharuskan pemerintah daerah mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan keuangan kepada masyarakat dan lembaga pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang transparan, pengelolaan anggaran yang tertib, serta mekanisme evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan (Mahmudi, 2019).

3. Prinsip Transparansi

   Prinsip transparansi menghendaki agar seluruh proses pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat memperoleh akses terhadap informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Transparansi menjadi salah satu prasyarat penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah (Republik Indonesia, 2022).

4. Prinsip Keadilan

   Prinsip keadilan menekankan bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan pemerataan kemampuan fiskal antardaerah. Daerah dengan kapasitas fiskal yang terbatas tetap memperoleh dukungan melalui mekanisme transfer fiskal sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik dengan standar yang memadai. Dengan demikian, desentralisasi fiskal tidak hanya bertujuan meningkatkan kemandirian daerah, tetapi juga mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah (Bird & Vaillancourt, 1999).

5. Prinsip Kemandirian Fiskal

   Prinsip kemandirian fiskal menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan kemandirian fiskal akan memperbesar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat (Halim, 2020).

6. Prinsip Keseimbangan Kewenangan dan Pendanaan

   Pelimpahan urusan pemerintahan kepada daerah harus diikuti dengan penyediaan sumber pendanaan yang memadai. Keseimbangan antara kewenangan dan kapasitas fiskal diperlukan agar pemerintah daerah mampu

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan secara efektif. Tanpa dukungan pendanaan yang cukup, pelaksanaan desentralisasi fiskal berpotensi menimbulkan ketimpangan pelayanan publik antardaerah (Musgrave, 1959; Oates, 1972).

Prinsip-prinsip tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik. Efisiensi memastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat yang optimal, akuntabilitas dan transparansi memperkuat kepercayaan publik, keadilan menjaga pemerataan pembangunan, sedangkan kemandirian fiskal dan keseimbangan kewenangan memastikan pemerintah daerah memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian, keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya bergantung pada besarnya kewenangan yang diberikan kepada daerah, tetapi juga pada konsistensi penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam penelitian ini, prinsip-prinsip desentralisasi fiskal menjadi dasar konseptual untuk memahami bagaimana pemerintah daerah mengelola Pendapatan Asli Daerah dan mengalokasikan Belanja Modal secara efektif sebagai bagian dari kebijakan fiskal daerah yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo.

d. Mekanisme Desentralisasi Fiskal

Pelaksanaan desentralisasi fiskal berlangsung melalui mekanisme hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mekanisme tersebut mengatur bagaimana kewenangan fiskal, sumber pendapatan, pengeluaran, serta pembiayaan didistribusikan agar pemerintah daerah mampu melaksanakan urusan pemerintahan secara efektif. Dalam kerangka Fiscal Federalism, mekanisme tersebut dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kewenangan yang diberikan kepada daerah dengan kemampuan fiskal yang dimiliki sehingga tujuan otonomi daerah dapat tercapai secara optimal (Oates, 1972; Musgrave, 1959).

Di Indonesia, mekanisme desentralisasi fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa hubungan keuangan diselenggarakan melalui pengaturan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, transfer ke daerah, serta penguatan kapasitas fiskal

pemerintah daerah. Seluruh mekanisme tersebut diarahkan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas, mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah, dan memperkuat pembangunan nasional secara berkelanjutan (Republik Indonesia, 2022).

Secara umum, mekanisme desentralisasi fiskal dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pelimpahan Kewenangan Fiskal

   Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan, termasuk kewenangan dalam menyusun kebijakan pendapatan dan belanja daerah. Pelimpahan kewenangan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing (Oates, 1972).

2. Pengelolaan Sumber Pendapatan Daerah

   Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, pemerintah daerah juga memperoleh pendanaan melalui mekanisme transfer dari pemerintah pusat sebagai bagian dari sistem hubungan keuangan nasional (Republik Indonesia, 2022; Halim, 2020).

3. Pengalokasian Belanja Daerah

   Pendapatan yang diterima pemerintah daerah selanjutnya dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Pengalokasian tersebut harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas agar penggunaan anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat (Mahmudi, 2019).

4. Pengawasan dan Pertanggungjawaban

   Pelaksanaan desentralisasi fiskal disertai dengan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan, mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD, serta membuka ruang pengawasan oleh lembaga pemeriksa dan masyarakat.

Mekanisme ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (Mahmudi, 2019; Republik Indonesia, 2022).

Keempat mekanisme tersebut membentuk suatu siklus pengelolaan fiskal yang saling berkaitan. Pelimpahan kewenangan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan, pendapatan tersebut kemudian dialokasikan melalui APBD untuk membiayai pembangunan, sedangkan mekanisme pengawasan memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, efektivitas desentralisasi fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya kewenangan yang diberikan kepada daerah, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan setiap mekanisme tersebut.

Dalam penelitian ini, mekanisme desentralisasi fiskal menjadi dasar untuk memahami bagaimana Pemerintah Kabupaten Gorontalo memperoleh kewenangan dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah dan mengalokasikan Belanja Modal sebagai instrumen kebijakan fiskal yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

e. Hubungan Desentralisasi Fiskal dengan Penelitian

Desentralisasi fiskal merupakan landasan konseptual yang menjelaskan hubungan antara kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui pelimpahan kewenangan fiskal, pemerintah daerah diberikan ruang untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, menyusun prioritas pengeluaran, dan mengelola pembiayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kewenangan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik sekaligus memperkuat kapasitas daerah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi (Oates, 1972; Musgrave, 1959).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, desentralisasi fiskal memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kewenangan tersebut memungkinkan pemerintah daerah merumuskan kebijakan fiskal yang lebih sesuai dengan karakteristik ekonomi dan potensi wilayah. Oleh karena itu, keberhasilan desentralisasi fiskal sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola

sumber-sumber penerimaan serta mengalokasikan belanja secara efektif dan bertanggung jawab (Republik Indonesia, 2022; Halim, 2020).

Dalam konteks penelitian ini, Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator yang mencerminkan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam menghimpun penerimaan dari potensi ekonomi lokal. Semakin besar kapasitas fiskal yang dimiliki, semakin luas ruang bagi pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah. Kapasitas tersebut menjadi salah satu prasyarat penting bagi penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Bird & Vaillancourt, 1999; Mahmudi, 2019). Selanjutnya, kemampuan fiskal tersebut diwujudkan melalui pengalokasian Belanja Modal sebagai bentuk investasi pemerintah daerah. Belanja Modal digunakan untuk membangun infrastruktur dan menyediakan berbagai fasilitas publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang memadai diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi daerah (Musgrave, 1959; Oates, 1999).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa desentralisasi fiskal tidak hanya menjadi dasar pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah, tetapi juga menjadi kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini, desentralisasi fiskal tidak diposisikan sebagai variabel yang diuji secara langsung, melainkan sebagai landasan teoritis yang menjelaskan mengapa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengoptimalkan kapasitas fiskalnya dan mengalokasikan investasi publik guna mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo.

2.1.2 Kebijakan Fiskal Daerah

a. Pengertian Kebijakan Fiskal Daerah

Kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan ekonomi, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, menciptakan pemerataan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam teori keuangan publik, kebijakan fiskal dijalankan melalui pengaturan instrumen pendapatan dan belanja pemerintah sebagai sarana untuk melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi sebagaimana

dikemukakan oleh Musgrave (1959). Oleh karena itu, kebijakan fiskal tidak hanya dipahami sebagai instrumen pengelolaan anggaran, tetapi juga sebagai alat pemerintah dalam memengaruhi aktivitas ekonomi secara makro.

Dalam konteks pemerintahan daerah, kebijakan fiskal daerah merupakan bagian dari kebijakan fiskal nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan melalui sistem desentralisasi fiskal. Kebijakan ini diwujudkan melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Melalui kewenangan tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing, sepanjang tetap berada dalam kerangka kebijakan fiskal nasional (Oates, 1972; Halim, 2020).

Dari perspektif administrasi keuangan daerah, kebijakan fiskal daerah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga menyangkut efektivitas pengalokasian belanja untuk mendukung pembangunan. Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa kualitas kebijakan fiskal daerah tercermin dari kemampuan pemerintah daerah mengelola sumber daya keuangan secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan fiskal daerah tidak diukur semata-mata dari besarnya anggaran yang dimiliki, tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menghasilkan manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, penyelenggaraan kebijakan fiskal daerah memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan fiskal daerah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, kebijakan fiskal daerah dapat dipahami sebagai serangkaian kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah melalui APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kapasitas fiskal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini, kebijakan fiskal daerah menjadi kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan dan Belanja Modal sebagai instrumen pengeluaran pemerintah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo.

b. Tujuan Kebijakan Fiskal Daerah

Kebijakan fiskal daerah disusun sebagai instrumen pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan melalui pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam teori keuangan publik, kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan anggaran, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengalokasikan sumber daya, mendistribusikan kesejahteraan, dan menjaga stabilitas perekonomian. Ketiga fungsi tersebut dikemukakan oleh Musgrave (1959) sebagai fungsi alokasi (allocation function), distribusi (distribution function), dan stabilisasi (stabilization function), yang hingga kini masih menjadi dasar konseptual dalam perumusan kebijakan fiskal di berbagai negara.

Dalam konteks pemerintahan daerah, tujuan kebijakan fiskal tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Oates (1972) menjelaskan bahwa pelimpahan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah bertujuan meningkatkan efisiensi penyediaan barang dan jasa publik karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan dan karakteristik masyarakat dibandingkan pemerintah pusat. Pandangan tersebut kemudian diperkuat oleh Oates (1999), yang menyatakan bahwa kebijakan fiskal daerah juga diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah melalui kedekatan antara penyelenggara pemerintahan dan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan publik. Dengan demikian, kebijakan fiskal daerah tidak hanya

berorientasi pada pengelolaan anggaran, tetapi juga pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, tujuan kebijakan fiskal daerah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menekankan bahwa hubungan keuangan antarpemerintah diselenggarakan untuk mendukung pelayanan publik, mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, memperkuat sinergi fiskal nasional, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan agar pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan teori, regulasi, dan praktik pengelolaan keuangan daerah, tujuan kebijakan fiskal daerah dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Meningkatkan Efisiensi Alokasi Sumber Daya

   Kebijakan fiskal daerah diarahkan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan daerah dialokasikan pada program dan kegiatan yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Pengalokasian anggaran yang efisien diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong aktivitas ekonomi daerah (Musgrave, 1959; Oates, 1972).

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

   Melalui pengelolaan APBD, pemerintah daerah dapat menyediakan pelayanan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun pelayanan administrasi. Pelayanan publik yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan memperkuat daya saing daerah (Oates, 1999; Halim, 2020).

3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

   Kebijakan fiskal daerah bertujuan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan pendapatan daerah dan pengalokasian belanja yang produktif, khususnya belanja modal. Investasi pemerintah daerah pada infrastruktur dan fasilitas publik diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi, menarik investasi, serta menciptakan lapangan kerja (Musgrave, 1959; Mahmudi, 2019).

4. Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah

   Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu tujuan penting kebijakan fiskal daerah karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi kapasitas fiskal daerah, semakin besar pula ruang fiskal yang dimiliki untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan prioritas daerah (Halim, 2020; Republik Indonesia, 2022).

5. Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik

   Kebijakan fiskal daerah juga bertujuan memperkuat prinsip good governance melalui penerapan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam seluruh proses pengelolaan keuangan daerah. Tata kelola yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan daerah (Mahmudi, 2019; PP Nomor 12 Tahun 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan kebijakan fiskal daerah tidak hanya berorientasi pada keseimbangan anggaran, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kapasitas fiskal, dan percepatan pembangunan ekonomi daerah. Pencapaian tujuan tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks penelitian ini, tujuan kebijakan fiskal daerah menjadi dasar konseptual untuk menjelaskan bagaimana optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan pengalokasian Belanja Modal dapat berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo.

c. Instrumen Kebijakan Fiskal Daerah

Kebijakan fiskal daerah diimplementasikan melalui berbagai instrumen yang menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah. Instrumen tersebut merupakan sarana yang digunakan pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, memberikan pelayanan publik, serta mendorong pembangunan ekonomi melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam perspektif keuangan publik, instrumen fiskal mencerminkan bagaimana pemerintah memperoleh sumber pendanaan, mengalokasikan anggaran, dan

mengelola pembiayaan untuk mencapai tujuan pembangunan (Musgrave, 1959). Oleh karena itu, efektivitas kebijakan fiskal daerah sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan setiap instrumen tersebut.

Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, instrumen kebijakan fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, kebijakan fiskal daerah dilaksanakan melalui tiga instrumen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

1. Pendapatan Daerah

   Pendapatan daerah merupakan seluruh hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu periode anggaran. Pendapatan daerah menjadi sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Di antara ketiga komponen tersebut, Pendapatan Asli Daerah memiliki peran strategis karena mencerminkan kemampuan fiskal dan tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan (Republik Indonesia, 2022; Halim, 2020).

2. Belanja Daerah

   Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu komponen belanja yang memiliki hubungan langsung dengan pembangunan ekonomi adalah Belanja Modal, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap seperti jalan, jembatan, gedung, irigasi, dan sarana publik lainnya. Investasi pemerintah melalui Belanja Modal diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mahmudi, 2019; PP Nomor 12 Tahun 2019).

3. Pembiayaan Daerah

   Pembiayaan daerah merupakan seluruh transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan, seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, dan penerimaan pinjaman daerah, serta pengeluaran pembiayaan seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah, dan pembayaran pokok utang. Berbeda dengan pendapatan dan belanja, pembiayaan daerah tidak secara langsung mencerminkan kinerja fiskal, tetapi berfungsi menjaga kesinambungan pelaksanaan APBD dan stabilitas fiskal daerah (Republik Indonesia, 2019).

Ketiga instrumen tersebut membentuk satu sistem pengelolaan fiskal yang saling berkaitan. Pendapatan daerah menyediakan kapasitas fiskal yang diperlukan untuk membiayai berbagai program pembangunan, sedangkan belanja daerah merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya tersebut untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Di sisi lain, pembiayaan daerah berfungsi menjaga keseimbangan anggaran sehingga pelaksanaan program pembangunan tetap dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dengan demikian, efektivitas kebijakan fiskal daerah tidak ditentukan oleh satu instrumen secara terpisah, tetapi oleh sinergi antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam mencapai tujuan pembangunan.

Dalam konteks penelitian ini, ketiga instrumen kebijakan fiskal daerah memiliki tingkat relevansi yang berbeda. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari pendapatan daerah dan Belanja Modal sebagai bagian dari belanja daerah merupakan variabel utama yang dianalisis karena keduanya secara teoritis memiliki hubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pembiayaan daerah tidak dijadikan variabel penelitian, tetapi tetap dipahami sebagai instrumen yang mendukung kesinambungan pengelolaan APBD. Oleh karena itu, pembahasan mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal akan diuraikan lebih mendalam pada subbab berikutnya sebagai landasan teoritis utama dalam penelitian ini.

d. Kebijakan Fiskal Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pelaksanaan kebijakan fiskal daerah diwujudkan melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan keuangan tahunan, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan prioritas pembangunan daerah melalui pengalokasian sumber daya fiskal secara terencana dan terukur. Dalam perspektif keuangan publik, kualitas kebijakan fiskal daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi APBD secara efektif sehingga mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat (Musgrave, 1959; Halim, 2020).

Pengelolaan APBD di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, ekonomis, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, APBD tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian anggaran, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (Republik Indonesia, 2019; Republik Indonesia, 2020).

Secara umum, pengelolaan APBD dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan sebagai berikut.

1. Perencanaan Anggaran

   Tahap perencanaan merupakan proses penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan, serta prioritas pembangunan nasional dan daerah. Pada tahap ini, pemerintah daerah menyusun kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara sebagai dasar penyusunan APBD.

2. Penganggaran

   Tahap penganggaran merupakan proses penyusunan Rancangan APBD berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah serta kemampuan pendapatan

yang tersedia. Pada tahap ini dilakukan penyesuaian antara target penerimaan daerah, kebutuhan belanja, dan sumber pembiayaan sehingga tercipta keseimbangan fiskal.

3. Pelaksanaan Anggaran

   Setelah APBD ditetapkan, pemerintah daerah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disahkan. Pelaksanaan anggaran harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal.

4. Penatausahaan dan Pelaporan

   Seluruh transaksi keuangan daerah dicatat, dikelola, dan dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tahapan ini bertujuan memastikan bahwa penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun keuangan.

5. Pertanggungjawaban dan Pengawasan

   Tahap terakhir meliputi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta evaluasi terhadap pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar perbaikan kebijakan fiskal pada periode anggaran berikutnya.

Seluruh tahapan tersebut membentuk satu siklus pengelolaan APBD yang saling berkaitan. Efektivitas kebijakan fiskal daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan atau belanja daerah, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, ketepatan pengalokasian anggaran, disiplin pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan yang berjalan secara konsisten. Dengan demikian, APBD menjadi instrumen utama yang menghubungkan kebijakan fiskal dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam penelitian ini, APBD memiliki posisi yang penting karena menjadi sumber data bagi variabel yang diteliti. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen pendapatan daerah, sedangkan Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah yang dialokasikan untuk pembentukan aset tetap dan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, analisis mengenai pengaruh kedua variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari sistem pengelolaan APBD sebagai instrumen utama kebijakan fiskal daerah.

e. Hubungan Kebijakan Fiskal Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan fiskal daerah merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah daerah untuk memengaruhi aktivitas ekonomi melalui pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dalam teori keuangan publik, kebijakan fiskal dipandang sebagai sarana untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, memperbaiki distribusi pendapatan, serta menjaga stabilitas perekonomian. Melalui pengelolaan fiskal yang tepat, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan investasi, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat (Musgrave, 1959). Oleh karena itu, efektivitas kebijakan fiskal daerah menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi di tingkat daerah.

Dalam perspektif *Fiscal Federalism*, Oates (1972) menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki keunggulan dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sehingga mampu mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran dibandingkan pemerintah pusat. Kewenangan tersebut memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang kebijakan fiskal yang sesuai dengan karakteristik ekonomi wilayahnya. Ketika kebijakan fiskal diarahkan pada sektor-sektor produktif, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penyediaan layanan publik, maka aktivitas ekonomi daerah akan meningkat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pengelolaan fiskal yang tidak efektif dapat mengurangi efisiensi penggunaan anggaran dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan (Oates, 1972; Oates, 1999).

Hubungan antara kebijakan fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme utama sebagai berikut.

1. Optimalisasi Pendapatan Daerah

   Peningkatan kapasitas pendapatan daerah, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah, memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan. Daerah yang memiliki kemampuan menghimpun pendapatan secara mandiri cenderung lebih fleksibel dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat (Halim, 2020).

2. Pengalokasian Belanja yang Produktif

   Belanja daerah yang diarahkan pada kegiatan produktif, terutama Belanja Modal, berperan dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang mendukung kegiatan ekonomi. Investasi pemerintah pada aset tetap seperti jalan, jembatan, irigasi, dan sarana pelayanan publik dapat meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif (Mahmudi, 2019; Musgrave, 1959).

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

   Kebijakan fiskal daerah yang efektif memungkinkan pemerintah menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, transportasi, dan administrasi publik yang lebih baik. Peningkatan kualitas pelayanan tersebut dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Oates, 1999).

4. Meningkatkan Kepercayaan dan Investasi

   Pengelolaan fiskal yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat maupun investor terhadap pemerintah daerah. Kondisi tersebut berpotensi mendorong peningkatan investasi, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, sehingga mempercepat aktivitas ekonomi daerah (Mahmudi, 2019).

Meskipun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan, menetapkan prioritas belanja, menjaga disiplin anggaran, serta mengevaluasi hasil pelaksanaan program menjadi faktor yang menentukan efektivitas kebijakan fiskal. Oleh karena itu, hubungan antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi dapat berbeda antar daerah, bergantung pada kapasitas fiskal, kualitas kelembagaan, dan karakteristik ekonomi masing-masing wilayah (Oates, 1999; Halim, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan fiskal daerah merupakan instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah secara efektif. Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan fiskal daerah direpresentasikan melalui dua instrumen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai

indikator kapasitas fiskal daerah dan Belanja Modal sebagai bentuk pengeluaran pemerintah yang bersifat produktif. Kedua variabel tersebut dipilih karena secara teoritis memiliki hubungan langsung dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan menjadi fokus utama dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen utama pendapatan daerah yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi daerahnya sendiri. Dalam sistem desentralisasi fiskal, PAD memiliki posisi strategis karena menjadi indikator tingkat kemandirian fiskal daerah sekaligus menunjukkan kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat (Oates, 1972; Halim, 2020). Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin besar pula ruang fiskal yang dimiliki pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya.

Secara normatif, Pendapatan Asli Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. PAD menjadi bagian dari pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta mendukung penyelenggaraan otonomi daerah secara bertanggung jawab (Republik Indonesia, 2022). Dengan demikian, PAD tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Dalam perspektif administrasi keuangan daerah, Halim (2020) menjelaskan bahwa PAD merupakan ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal. Daerah yang mampu meningkatkan PAD secara berkelanjutan umumnya memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor prioritas dibandingkan daerah yang masih bergantung pada dana transfer. Pendapat

tersebut diperkuat oleh Mahmudi (2019), yang menyatakan bahwa peningkatan PAD mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi sekaligus menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Dari perspektif *Fiscal Federalism*, PAD memiliki hubungan erat dengan prinsip kemandirian fiskal. Oates (1999) menegaskan bahwa desentralisasi fiskal akan berjalan secara efektif apabila pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk membiayai sebagian kebutuhan publik melalui sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri. Kemampuan tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga memperkuat akuntabilitas karena masyarakat dapat menilai secara langsung hubungan antara pajak atau retribusi yang dibayarkan dengan kualitas pelayanan publik yang diterima. Oleh karena itu, optimalisasi PAD menjadi salah satu prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi desentralisasi fiskal.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, PAD tidak dipandang semata-mata sebagai target penerimaan yang harus dicapai setiap tahun anggaran. Lebih dari itu, PAD merupakan refleksi dari kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, mengelola aset daerah secara produktif, serta mengembangkan berbagai sumber pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peningkatan PAD harus ditempuh melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan perbaikan tata kelola, bukan melalui peningkatan beban fiskal yang dapat menghambat aktivitas ekonomi daerah.

Berdasarkan berbagai pandangan teoritis, regulasi, dan konsep administrasi keuangan daerah tersebut, Pendapatan Asli Daerah dapat dipahami sebagai seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang berasal dari wilayahnya sendiri dan dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam penelitian ini, PAD diposisikan sebagai indikator kapasitas fiskal daerah yang diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghimpun PAD secara berkelanjutan, semakin besar peluang pemerintah daerah untuk

meningkatkan investasi publik dan mendorong aktivitas ekonomi melalui penyediaan infrastruktur serta pelayanan publik yang berkualitas.

b. Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan instrumen fiskal yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Keberadaan PAD tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah daerah, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas fiskal sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih besar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif desentralisasi fiskal, peningkatan PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan (Oates, 1972; Halim, 2020).

Secara normatif, tujuan pengelolaan PAD berkaitan erat dengan pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut menempatkan PAD sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kemandirian fiskal, serta mendorong pemerataan pembangunan antardaerah. Dengan demikian, peningkatan PAD bukan sekadar upaya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat keberlanjutan fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, tujuan Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah

   Tujuan utama PAD adalah memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri. Daerah dengan kontribusi PAD yang tinggi umumnya memiliki tingkat ketergantungan yang lebih rendah terhadap dana transfer pemerintah pusat sehingga memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan daerah (Halim, 2020; Oates, 1999).

2. Mendukung Pembiayaan Pembangunan Daerah

   PAD berfungsi sebagai sumber pembiayaan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Peningkatan penerimaan daerah memungkinkan pemerintah memperluas investasi pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mahmudi, 2019).

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

   Optimalisasi PAD memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan publik. Ketersediaan sumber pendanaan yang memadai memungkinkan pemerintah daerah menyediakan layanan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Halim, 2020).

4. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

   PAD juga memiliki fungsi sebagai instrumen untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun dan mengelola PAD secara efektif memungkinkan tersedianya anggaran bagi pembangunan infrastruktur ekonomi, pengembangan sektor produktif, serta penciptaan iklim investasi yang lebih baik. Kondisi tersebut pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Musgrave, 1959; Mahmudi, 2019).

5. Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

   Pendapatan yang berasal dari masyarakat melalui pajak daerah dan retribusi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara transparan dan bertanggung jawab. Hubungan langsung antara penerimaan daerah dan pelayanan publik mendorong pemerintah daerah meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat (Oates, 1999).

Selain memiliki tujuan, PAD juga menjalankan beberapa fungsi strategis dalam sistem keuangan daerah. Pertama, fungsi fiskal, yaitu sebagai sumber utama penerimaan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, fungsi alokasi, yaitu mendukung penyediaan barang dan jasa publik

melalui pembiayaan program pembangunan. Ketiga, fungsi distribusi, yaitu membantu pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang lebih merata bagi masyarakat. Keempat, fungsi pembangunan, yaitu mendukung investasi pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor produktif yang mampu meningkatkan aktivitas ekonomi daerah (Musgrave, 1959; Halim, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan dan fungsi Pendapatan Asli Daerah tidak hanya berkaitan dengan peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya fiskalnya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini, PAD diposisikan sebagai indikator kapasitas fiskal daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai Belanja Modal dan menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo.

c. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari sumber-sumber penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi daerah dan dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan sumber-sumber PAD mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Semakin optimal pengelolaan setiap sumber PAD, semakin besar pula kemampuan fiskal daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Halim, 2020; Mahmudi, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas empat sumber utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Republik Indonesia, 2022). Keempat komponen tersebut saling melengkapi dalam membentuk kapasitas fiskal pemerintah daerah.

1. Pajak Daerah

   Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa memperoleh imbalan secara langsung. Pajak daerah menjadi sumber PAD yang paling dominan di sebagian besar

pemerintah daerah karena memiliki basis penerimaan yang relatif stabil dan berkelanjutan. Besarnya penerimaan pajak daerah umumnya dipengaruhi oleh tingkat aktivitas ekonomi, jumlah penduduk, perkembangan sektor usaha, serta efektivitas administrasi perpajakan daerah. Oleh karena itu, optimalisasi pajak daerah menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah (Republik Indonesia, 2022; Halim, 2020).

2. Retribusi Daerah

   Retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Berbeda dengan pajak daerah, retribusi memiliki hubungan langsung dengan pelayanan yang diterima masyarakat. Penerimaan retribusi sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik, tingkat pemanfaatan fasilitas daerah, serta efektivitas sistem pemungutan. Pengelolaan retribusi yang baik tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik (Mahmudi, 2019).

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

   Komponen ini berasal dari bagian laba atau dividen atas penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun badan usaha lainnya. Kontribusinya terhadap PAD bergantung pada kinerja perusahaan daerah, tata kelola korporasi, dan efektivitas pengelolaan investasi pemerintah daerah. Meskipun kontribusinya di beberapa daerah relatif lebih kecil dibandingkan pajak dan retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tetap memiliki peran strategis dalam memperkuat struktur pendapatan daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap sumber penerimaan lainnya (Halim, 2020).

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

   Komponen ini mencakup berbagai penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam tiga kelompok sebelumnya, seperti hasil penjualan aset yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, denda administrasi, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, serta penerimaan sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun sifatnya lebih beragam dan fluktuatif, kelompok pendapatan ini tetap memberikan kontribusi terhadap kemampuan fiskal daerah apabila dikelola secara optimal dan akuntabel (Republik Indonesia, 2022).

Keempat sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut membentuk struktur penerimaan yang saling melengkapi. Pajak daerah dan retribusi daerah umumnya menjadi sumber penerimaan operasional yang paling dominan, sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah berfungsi sebagai sumber pendapatan pendukung yang dapat meningkatkan fleksibilitas fiskal pemerintah daerah. Oleh karena itu, strategi peningkatan PAD tidak cukup hanya berfokus pada optimalisasi satu komponen, tetapi harus dilakukan melalui penguatan seluruh sumber penerimaan sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing daerah.

Dalam konteks penelitian ini, Pendapatan Asli Daerah diperlakukan sebagai satu variabel yang diukur berdasarkan realisasi total PAD sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo. Meskipun penelitian ini tidak menganalisis pengaruh masing-masing komponen PAD secara terpisah, pemahaman terhadap sumber-sumber PAD tetap penting karena menunjukkan asal-usul kapasitas fiskal daerah yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pembangunan, termasuk melalui alokasi Belanja Modal yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

d. Faktor-faktor yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah

Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemungutan pajak dan retribusi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, kelembagaan, dan administrasi yang berkembang di suatu daerah. Perbedaan karakteristik wilayah, tingkat aktivitas ekonomi, kualitas tata kelola pemerintahan, serta kapasitas aparatur menyebabkan kemampuan setiap pemerintah daerah dalam menghimpun PAD menjadi berbeda. Oleh karena itu, peningkatan PAD memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan tarif atau perluasan objek pajak, tetapi juga pada penguatan kapasitas fiskal dan tata kelola pemerintahan daerah (Halim, 2020; Mahmudi, 2019).

Dalam perspektif Fiscal Federalism, kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri merupakan salah satu indikator keberhasilan desentralisasi fiskal. Oates (1999) menjelaskan bahwa efektivitas otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal untuk membiayai kebutuhan publik. Semakin besar kemampuan daerah menggali sumber penerimaan secara mandiri, semakin tinggi

pula tingkat kemandirian fiskalnya dan semakin kecil ketergantungannya terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Berdasarkan teori, regulasi, dan praktik pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

1. Potensi Ekonomi Daerah

   Potensi ekonomi merupakan faktor mendasar yang menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun PAD. Daerah yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi, didukung oleh sektor perdagangan, industri, jasa, pertanian, atau pariwisata yang berkembang, umumnya memiliki basis pajak dan retribusi yang lebih luas dibandingkan daerah dengan aktivitas ekonomi yang terbatas. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga akan memperbesar kapasitas masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah sehingga berdampak pada peningkatan PAD (Halim, 2020).

2. Jumlah Penduduk dan Aktivitas Masyarakat

   Jumlah penduduk memengaruhi besarnya potensi penerimaan daerah karena berkaitan dengan tingkat konsumsi, penggunaan layanan publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Semakin besar jumlah penduduk yang produktif serta semakin tinggi tingkat aktivitas ekonomi, maka potensi penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah juga cenderung meningkat. Namun demikian, peningkatan jumlah penduduk harus diimbangi dengan penyediaan pelayanan publik yang memadai agar memberikan dampak positif terhadap kapasitas fiskal daerah (Mahmudi, 2019).

3. Efektivitas Sistem Pemungutan

   Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem pemungutan pajak dan retribusi. Sistem administrasi yang sederhana, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas basis data wajib pajak, serta kemampuan aparatur dalam melakukan pengawasan akan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dan mengurangi potensi kebocoran penerimaan daerah. Oleh karena itu, reformasi administrasi perpajakan daerah menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan PAD (Halim, 2020).

4. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

   Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan PAD. Pemerintah daerah yang

menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan cenderung mampu mengelola penerimaan daerah secara lebih optimal. Sebaliknya, lemahnya tata kelola dapat mengurangi efektivitas pemungutan, meningkatkan risiko kebocoran penerimaan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Mahmudi, 2019).

5. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah

   Perubahan kebijakan nasional maupun daerah mengenai pajak daerah, retribusi daerah, serta hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga memengaruhi besarnya PAD. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah misalnya, membawa perubahan dalam pengaturan jenis pajak dan retribusi daerah yang bertujuan meningkatkan efisiensi pemungutan sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, perkembangan regulasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika PAD dari waktu ke waktu.

Kelima faktor tersebut saling berinteraksi dalam menentukan kemampuan pemerintah daerah menghimpun Pendapatan Asli Daerah. Potensi ekonomi yang besar tidak akan menghasilkan penerimaan yang optimal tanpa sistem pemungutan yang efektif dan tata kelola yang baik. Sebaliknya, daerah dengan potensi ekonomi yang terbatas masih dapat meningkatkan PAD melalui inovasi pelayanan, digitalisasi administrasi perpajakan, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta peningkatan kualitas aparatur pengelola keuangan daerah.

Dalam konteks penelitian ini, faktor-faktor yang memengaruhi PAD menjadi dasar konseptual untuk memahami bahwa perubahan nilai PAD Kabupaten Gorontalo selama periode 2015–2024 dipengaruhi oleh berbagai kondisi ekonomi dan kelembagaan. Meskipun faktor-faktor tersebut tidak diuji secara langsung dalam model penelitian, keberadaannya perlu dipahami sebagai bagian dari konteks yang dapat memengaruhi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi.

e. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator utama kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berperan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan aktivitas ekonomi. Dalam sistem desentralisasi

fiskal, kemampuan pemerintah daerah menghimpun PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal sekaligus menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer pemerintah pusat. Oleh karena itu, peningkatan PAD pada dasarnya diharapkan mampu memperbesar ruang fiskal pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik, membangun infrastruktur, dan melaksanakan program pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Oates, 1972; Oates, 1999).

Dalam perspektif keuangan publik, Musgrave (1959) menjelaskan bahwa pemerintah menjalankan fungsi alokasi melalui penyediaan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh mekanisme pasar. Pada tingkat pemerintah daerah, fungsi tersebut diwujudkan melalui penggunaan sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk PAD, untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya. Apabila penerimaan PAD meningkat dan dialokasikan secara efektif, maka kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas publik juga meningkat, sehingga produktivitas ekonomi masyarakat dapat berkembang dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme. Pertama, peningkatan PAD memperluas kapasitas fiskal pemerintah daerah sehingga tersedia ruang yang lebih besar untuk membiayai investasi publik, terutama melalui Belanja Modal. Kedua, peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik akan menurunkan biaya aktivitas ekonomi, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing daerah. Ketiga, daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat cenderung memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam merespons kebutuhan pembangunan sesuai karakteristik wilayahnya. Dengan demikian, PAD tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga menjadi instrumen yang memungkinkan pemerintah daerah menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih kondusif bagi pertumbuhan (Halim, 2020; Mahmudi, 2019).

Meskipun demikian, hubungan antara PAD dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu bersifat otomatis. Besarnya PAD belum tentu menghasilkan pertumbuhan ekonomi apabila peningkatan penerimaan tersebut tidak diikuti oleh pengelolaan anggaran yang efektif dan berorientasi pada pembangunan produktif. Sebaliknya,

daerah dengan PAD yang relatif terbatas masih dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik apabila mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien serta memanfaatkan berbagai sumber pendanaan secara optimal. Dengan kata lain, efektivitas penggunaan PAD memiliki peranan yang sama pentingnya dengan besarnya penerimaan itu sendiri dalam menentukan dampaknya terhadap perekonomian daerah (Oates, 1999).

Sejumlah penelitian empiris di Indonesia juga menunjukkan bahwa PAD pada umumnya memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi daerah, meskipun besarnya pengaruh berbeda antarwilayah. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi daerah, kapasitas kelembagaan, kualitas tata kelola keuangan, serta efektivitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pembangunan. Temuan ini menunjukkan bahwa PAD bukan hanya indikator penerimaan fiskal, tetapi juga mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi lokal untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian teoritis dan temuan empiris tersebut, dapat dipahami bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Semakin besar kemampuan daerah dalam menghimpun PAD dan mengalokasikannya secara efektif pada sektor-sektor produktif, semakin besar pula peluang terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini, Pendapatan Asli Daerah diposisikan sebagai variabel independen yang diduga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo. Dugaan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa peningkatan kapasitas fiskal akan memperluas kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

2.1.4 Belanja Modal

a. Pengertian Belanja Modal

Belanja Modal merupakan salah satu komponen belanja daerah yang dialokasikan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, Belanja Modal memiliki peran strategis karena digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana dan prasarana publik,

serta investasi pemerintah daerah yang mendukung peningkatan kapasitas pelayanan kepada masyarakat. Berbeda dengan belanja operasional yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan, Belanja Modal menghasilkan aset yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sehingga memberikan manfaat ekonomi maupun sosial dalam jangka panjang (Mahmudi, 2019; Halim, 2020).

Dalam perspektif keuangan publik, Belanja Modal merupakan implementasi dari fungsi alokasi pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh Musgrave (1959). Pemerintah memiliki tanggung jawab menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat dipenuhi secara optimal oleh mekanisme pasar. Pada tingkat pemerintah daerah, fungsi tersebut diwujudkan melalui pembangunan jalan, jembatan, irigasi, gedung sekolah, fasilitas kesehatan, jaringan air bersih, dan berbagai infrastruktur lainnya yang menjadi dasar bagi peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Belanja Modal dipandang sebagai bentuk investasi publik (public investment) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan aset publik yang berkualitas.

Secara normatif, pengelolaan Belanja Modal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua regulasi tersebut menjelaskan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran serta memenuhi kriteria kapitalisasi aset sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintahan. Dengan demikian, Belanja Modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran pemerintah, tetapi juga sebagai investasi yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kapasitas pembangunan daerah.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, Belanja Modal mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya fiskal pada kegiatan-kegiatan produktif. Oates (1972) menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki keunggulan dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Oleh karena itu, pengalokasian Belanja Modal yang tepat sasaran diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penyediaan infrastruktur dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Pandangan tersebut

menunjukkan bahwa efektivitas Belanja Modal tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya.

Dalam praktik pengelolaan APBD, Belanja Modal menjadi salah satu indikator yang sering digunakan untuk menilai komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan jangka panjang. Daerah yang mengalokasikan proporsi Belanja Modal secara memadai umumnya memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, memperbaiki pelayanan publik, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan aktivitas ekonomi. Sebaliknya, proporsi Belanja Modal yang rendah dapat menghambat pembentukan aset publik dan membatasi kemampuan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan (Halim, 2020; Mahmudi, 2019).

Berdasarkan berbagai pandangan teoritis, regulasi, dan konsep pengelolaan keuangan daerah tersebut, Belanja Modal dapat dipahami sebagai pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat jangka panjang bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam penelitian ini, Belanja Modal diposisikan sebagai variabel independen yang diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo melalui peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, dan produktivitas ekonomi masyarakat.

b. Tujuan dan Fungsi Belanja Modal

Belanja Modal merupakan salah satu bentuk pengeluaran pemerintah daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik melalui penyediaan aset tetap dan infrastruktur yang memberikan manfaat dalam jangka panjang. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Belanja Modal tidak dipandang sebagai pengeluaran konsumtif, melainkan sebagai investasi pemerintah yang bertujuan memperkuat fondasi pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengalokasian Belanja Modal menjadi salah satu indikator penting dalam menilai komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Halim, 2020; Mahmudi, 2019).

Dalam teori keuangan publik, Musgrave (1959) menjelaskan bahwa pemerintah menjalankan fungsi alokasi dengan menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh mekanisme pasar. Implementasi fungsi tersebut pada tingkat daerah diwujudkan melalui Belanja

Modal yang digunakan untuk membangun jalan, jembatan, irigasi, sekolah, rumah sakit, pasar, serta berbagai fasilitas publik lainnya. Keberadaan aset-aset tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, menurunkan biaya transaksi ekonomi, dan memperluas akses terhadap pelayanan publik sehingga memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi daerah.

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, tujuan Belanja Modal ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua regulasi tersebut mengatur bahwa Belanja Modal dialokasikan untuk memperoleh aset tetap yang digunakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, Belanja Modal tidak hanya bertujuan menambah aset pemerintah daerah, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan teori dan regulasi tersebut, tujuan Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah

   Belanja Modal bertujuan menyediakan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik, seperti pembangunan jalan, jembatan, jaringan irigasi, gedung pelayanan, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur yang memadai akan memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang sehingga meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi (Musgrave, 1959; Halim, 2020).

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

   Pengalokasian Belanja Modal memungkinkan pemerintah daerah memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, serta pelayanan administrasi. Peningkatan kualitas fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat dan memperkuat kualitas pelayanan pemerintah daerah (Mahmudi, 2019).

3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

   Belanja Modal berfungsi sebagai investasi pemerintah yang dapat menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah. Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan produktivitas sektor ekonomi,

memperluas kesempatan kerja, menarik investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan (Musgrave, 1959).

4. Meningkatkan Nilai Aset Pemerintah Daerah

   Belanja Modal juga bertujuan menambah aset tetap pemerintah daerah yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan. Penambahan aset yang dikelola secara baik akan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan jangka panjang (PP Nomor 12 Tahun 2019).

5. Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah

   Dalam kerangka desentralisasi fiskal, Belanja Modal menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing. Oates (1972) menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan masyarakat sehingga alokasi investasi publik yang dilakukan melalui Belanja Modal diharapkan lebih efektif dibandingkan apabila seluruh keputusan dilakukan secara terpusat.

Selain memiliki tujuan, Belanja Modal juga menjalankan beberapa fungsi strategis dalam pembangunan daerah. Pertama, fungsi pembangunan, yaitu menyediakan infrastruktur dan aset publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kedua, fungsi pelayanan, yaitu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, fungsi investasi, yaitu membentuk aset tetap yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial dalam jangka panjang. Keempat, fungsi pemerataan, yaitu memperluas akses masyarakat terhadap infrastruktur dan layanan publik sehingga mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah (Musgrave, 1959; Halim, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Belanja Modal tidak hanya berfungsi sebagai pengeluaran pemerintah daerah, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, dan produktivitas ekonomi. Dalam penelitian ini, Belanja Modal diposisikan sebagai variabel independen yang diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo karena investasi pemerintah pada aset tetap diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

c. Jenis-jenis Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dalam sistem akuntansi pemerintahan, pengelompokan Belanja Modal dilakukan berdasarkan karakteristik aset yang diperoleh sehingga memudahkan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan keuangan daerah. Klasifikasi tersebut juga memberikan gambaran mengenai prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam suatu periode anggaran (Republik Indonesia, 2019; Republik Indonesia, 2020).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Belanja Modal terdiri atas beberapa kelompok sebagai berikut.

1. Belanja Modal Tanah

   Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh hak atas tanah yang akan dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pengadaan tanah umumnya dilakukan sebagai tahap awal pembangunan berbagai fasilitas umum, seperti kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit, terminal, kawasan industri, maupun ruang terbuka publik. Meskipun manfaat ekonominya tidak selalu terlihat secara langsung, ketersediaan lahan menjadi prasyarat penting bagi pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi daerah.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

   Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran untuk memperoleh berbagai peralatan operasional yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, seperti kendaraan dinas, alat kesehatan, perangkat teknologi informasi, mesin produksi, serta berbagai peralatan lainnya. Pengadaan peralatan yang memadai akan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempercepat proses administrasi, serta mendukung peningkatan produktivitas organisasi pemerintah daerah (Mahmudi, 2019).

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

   Belanja Modal Gedung dan Bangunan dialokasikan untuk pembangunan, rehabilitasi, maupun peningkatan kualitas gedung yang digunakan dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Contohnya meliputi pembangunan kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, pasar, dan fasilitas pelayanan lainnya. Ketersediaan gedung yang representatif akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai aktivitas ekonomi dan sosial.

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

   Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi merupakan salah satu komponen Belanja Modal yang memiliki kontribusi paling besar terhadap pembangunan ekonomi daerah. Pengeluaran ini digunakan untuk pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, drainase, serta sistem irigasi. Infrastruktur tersebut berperan dalam menurunkan biaya distribusi, memperlancar mobilitas barang dan jasa, meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perdagangan, serta memperkuat konektivitas antarwilayah. Oleh karena itu, kelompok Belanja Modal ini sering dipandang sebagai bentuk investasi publik yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi (Musgrave, 1959; Halim, 2020).

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

   Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mencakup pengeluaran untuk memperoleh aset yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya, seperti koleksi perpustakaan, karya seni, aset budaya, perangkat penelitian, maupun aset tetap lainnya sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintahan. Walaupun kontribusinya terhadap nilai Belanja Modal umumnya lebih kecil, kelompok aset ini tetap memiliki peran dalam mendukung pelayanan publik, pelestarian budaya, pengembangan ilmu pengetahuan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kelima jenis Belanja Modal tersebut memiliki karakteristik dan kontribusi yang berbeda terhadap pembangunan daerah. Belanja Modal Tanah menyediakan ruang bagi pembangunan, Belanja Modal Peralatan dan Mesin meningkatkan kapasitas operasional pemerintah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan memperkuat kualitas pelayanan publik, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi mendorong aktivitas ekonomi melalui penyediaan infrastruktur dasar, sedangkan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mendukung berbagai fungsi pelayanan yang bersifat spesifik. Dengan demikian, efektivitas Belanja Modal tidak hanya

ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh keseimbangan komposisi pengeluaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Dalam konteks penelitian ini, Belanja Modal diperlakukan sebagai satu variabel yang diukur berdasarkan total realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Gorontalo selama periode 2015–2024. Penelitian ini tidak membedakan pengaruh masing-masing jenis Belanja Modal secara terpisah. Namun demikian, pemahaman terhadap klasifikasi Belanja Modal tetap penting untuk menjelaskan bahwa setiap komponen memiliki kontribusi yang berbeda dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

d. Faktor-faktor yang Memengaruhi Belanja Modal

Pengalokasian Belanja Modal merupakan salah satu keputusan strategis dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besarnya Belanja Modal yang dialokasikan oleh pemerintah daerah tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah, tetapi juga oleh berbagai faktor ekonomi, fiskal, kelembagaan, serta kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, variasi alokasi Belanja Modal antar daerah maupun antar periode anggaran merupakan konsekuensi dari perbedaan kapasitas fiskal, kebutuhan pembangunan, dan prioritas kebijakan masing-masing pemerintah daerah (Halim, 2020; Mahmudi, 2019).

Dalam perspektif Fiscal Federalism, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Oates (1972) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya pada sektor-sektor yang dinilai mampu memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Namun, efektivitas pengalokasian Belanja Modal tetap bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya fiskalnya secara efisien dan bertanggung jawab.

Berdasarkan teori keuangan publik, regulasi, dan praktik pengelolaan APBD, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi Belanja Modal sebagai berikut.

1. Kapasitas Fiskal Daerah

   Kapasitas fiskal merupakan faktor utama yang menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan Belanja Modal. Daerah yang

memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber penerimaan lainnya dalam jumlah yang memadai cenderung memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan investasi publik. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas fiskal yang terbatas umumnya lebih memprioritaskan belanja operasional sehingga proporsi Belanja Modal menjadi relatif lebih kecil (Halim, 2020).

2. Prioritas Pembangunan Daerah

   Pengalokasian Belanja Modal sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan dokumen perencanaan lainnya. Daerah yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar umumnya mengalokasikan Belanja Modal dalam proporsi yang lebih besar dibandingkan daerah yang lebih berfokus pada peningkatan belanja pelayanan rutin.

3. Kebutuhan Infrastruktur dan Pelayanan Publik

   Kondisi infrastruktur yang tersedia menjadi faktor penting dalam menentukan besarnya Belanja Modal. Daerah yang masih mengalami kekurangan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, jaringan irigasi, maupun sarana pelayanan publik lainnya memerlukan investasi pemerintah yang lebih besar. Oleh karena itu, kebutuhan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu dasar utama dalam penyusunan anggaran Belanja Modal (Mahmudi, 2019).

4. Kebijakan Pemerintah dan Regulasi

   Perubahan regulasi mengenai pengelolaan keuangan daerah, standar pelayanan minimal, maupun kebijakan pembangunan nasional turut memengaruhi pengalokasian Belanja Modal. Pemerintah daerah harus menyesuaikan struktur anggarannya dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pemenuhan prioritas nasional yang dilaksanakan melalui APBD. Dengan demikian, dinamika regulasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perubahan komposisi Belanja Modal dari tahun ke tahun (Republik Indonesia, 2019; Republik Indonesia, 2020).

5. Efektivitas Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

   Kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas juga menentukan efektivitas pengalokasian Belanja Modal.

Perencanaan yang didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat, didukung data yang memadai, serta diikuti dengan pelaksanaan dan pengawasan yang baik akan menghasilkan Belanja Modal yang lebih tepat sasaran. Sebaliknya, kelemahan dalam proses perencanaan dapat menyebabkan rendahnya kualitas investasi publik dan berkurangnya manfaat pembangunan yang dihasilkan (Mahmudi, 2019).

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan besarnya Belanja Modal yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Kapasitas fiskal yang kuat akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan investasi publik, tetapi keputusan pengalokasian tetap dipengaruhi oleh prioritas pembangunan, kebutuhan infrastruktur, arah kebijakan, serta kualitas tata kelola anggaran. Oleh karena itu, efektivitas Belanja Modal tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam konteks penelitian ini, perubahan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Gorontalo selama periode 2015–2024 dipengaruhi oleh berbagai kondisi fiskal dan kebijakan pembangunan daerah. Meskipun faktor-faktor tersebut tidak dianalisis sebagai variabel penelitian, pemahaman terhadapnya penting untuk memberikan konteks dalam menjelaskan dinamika Belanja Modal serta menginterpretasikan hubungan antara Belanja Modal dan pertumbuhan ekonomi.

e. Hubungan Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi

Belanja Modal merupakan salah satu bentuk investasi pemerintah daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pembangunan melalui penyediaan aset tetap dan infrastruktur publik. Dalam perspektif ekonomi publik, investasi pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan produktivitas masyarakat, memperluas kesempatan berusaha, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengalokasian Belanja Modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran pemerintah, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang yang diharapkan mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan (Musgrave, 1959).

Menurut teori fungsi alokasi yang dikemukakan oleh Musgrave (1959), pemerintah bertanggung jawab menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh mekanisme pasar. Dalam konteks pemerintah daerah, fungsi tersebut diwujudkan melalui pembangunan jalan,

jembatan, sistem irigasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, pasar, serta berbagai infrastruktur lainnya. Keberadaan infrastruktur tersebut akan meningkatkan efisiensi aktivitas ekonomi, menurunkan biaya distribusi, memperluas akses terhadap pasar, serta meningkatkan produktivitas masyarakat. Dengan demikian, Belanja Modal menjadi salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Dalam perspektif Fiscal Federalism, Oates (1972) menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu mengalokasikan Belanja Modal secara lebih efektif sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Pengalokasian investasi publik yang tepat sasaran akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat karena pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Sebaliknya, alokasi Belanja Modal yang tidak didasarkan pada prioritas pembangunan dapat mengurangi efektivitas investasi pemerintah dan membatasi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hubungan antara Belanja Modal dan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme. Pertama, pembangunan infrastruktur akan meningkatkan konektivitas antarwilayah sehingga memperlancar mobilitas barang, jasa, dan tenaga kerja. Kedua, tersedianya fasilitas publik yang memadai akan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan dunia usaha. Ketiga, investasi pemerintah pada aset tetap dapat menarik investasi swasta karena tersedianya infrastruktur yang mendukung kegiatan produksi dan distribusi. Keempat, pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja, baik pada tahap pembangunan maupun setelah infrastruktur tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat. Melalui mekanisme tersebut, Belanja Modal diharapkan memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap aktivitas ekonomi daerah (Halim, 2020; Mahmudi, 2019).

Namun demikian, besarnya Belanja Modal tidak selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Dampak Belanja Modal sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, ketepatan sasaran program, efisiensi pelaksanaan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam memelihara aset yang telah dibangun. Infrastruktur yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak dimanfaatkan secara optimal cenderung memberikan manfaat ekonomi yang

terbatas. Sebaliknya, Belanja Modal yang direncanakan berdasarkan kebutuhan pembangunan dan didukung oleh tata kelola yang baik akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat (Oates, 1999).

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa Belanja Modal pada umumnya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah karena meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas infrastruktur, dan mendorong aktivitas investasi. Namun demikian, besarnya pengaruh tersebut berbeda antar daerah, bergantung pada karakteristik ekonomi, kapasitas fiskal, kualitas kelembagaan, serta efektivitas pelaksanaan pembangunan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa Belanja Modal bukan hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan dan efektivitas pemanfaatannya.

Berdasarkan uraian teoritis tersebut, dapat dipahami bahwa Belanja Modal memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi publik dan penyediaan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam penelitian ini, Belanja Modal diposisikan sebagai variabel independen yang diduga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo. Semakin efektif pemerintah daerah mengalokasikan Belanja Modal pada sektor-sektor produktif, semakin besar peluang terciptanya peningkatan produktivitas, investasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara maupun daerah. Secara umum, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama periode tertentu yang tercermin melalui kenaikan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat daerah. Peningkatan tersebut menggambarkan bertambahnya aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh seluruh sektor produksi sehingga mencerminkan perkembangan perekonomian suatu wilayah dari waktu ke waktu (Todaro & Smith, 2021).

Dalam teori ekonomi klasik, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai proses peningkatan output yang dipengaruhi oleh akumulasi modal, pertumbuhan

penduduk, serta kemajuan teknologi. Adam Smith menekankan bahwa pembagian kerja (division of labour) dan spesialisasi produksi menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas sehingga mampu memperluas kapasitas produksi suatu perekonomian. David Ricardo kemudian menambahkan bahwa akumulasi modal dan pemanfaatan sumber daya alam turut menentukan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun dikembangkan dalam konteks ekonomi nasional, konsep tersebut tetap relevan untuk menjelaskan dinamika pertumbuhan ekonomi pada tingkat daerah.

Pandangan yang lebih modern dikemukakan oleh Solow (1956) melalui Teori Pertumbuhan Neoklasik, yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Dalam model tersebut, investasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas produksi karena penambahan modal fisik akan memperbesar kemampuan suatu daerah menghasilkan barang dan jasa. Namun demikian, Solow juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang tidak hanya bergantung pada peningkatan modal, tetapi juga pada kemajuan teknologi dan peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur melalui investasi pemerintah, termasuk Belanja Modal, dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat memperkuat kapasitas produksi daerah.

Pada tingkat pemerintahan daerah, pertumbuhan ekonomi umumnya diukur melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Penggunaan harga konstan bertujuan menghilangkan pengaruh perubahan harga (inflasi), sehingga perubahan nilai PDRB mencerminkan perubahan volume produksi riil. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai persentase perubahan PDRB atas dasar harga konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Indikator ini digunakan secara luas karena mampu menggambarkan perkembangan aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu daerah secara lebih objektif.

Dalam konteks pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi tidak hanya mencerminkan peningkatan nilai produksi, tetapi juga menunjukkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, serta memperkuat kapasitas fiskal pemerintah

daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan dukungan kebijakan fiskal yang efektif, investasi publik yang memadai, kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa yang tercermin melalui kenaikan PDRB riil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi diposisikan sebagai variabel dependen yang diukur menggunakan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Gorontalo selama periode 2015–2024. Variabel ini digunakan untuk menilai sejauh mana peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berkontribusi terhadap perkembangan aktivitas ekonomi daerah.

b. Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi telah menjadi salah satu fokus utama dalam teori ekonomi karena berkaitan dengan kemampuan suatu negara atau daerah meningkatkan kapasitas produksi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berbagai teori pertumbuhan ekonomi dikembangkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan output, mulai dari akumulasi modal, tenaga kerja, hingga kemajuan teknologi. Dalam penelitian ini, teori pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan bagaimana kapasitas fiskal pemerintah daerah melalui Pendapatan Asli Daerah dan investasi publik melalui Belanja Modal dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

1. Teori Pertumbuhan Klasik

   Teori pertumbuhan klasik yang dipelopori oleh Adam Smith menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, pembagian kerja (division of labour), dan spesialisasi produksi. Menurut Smith, peningkatan produktivitas terjadi ketika tenaga kerja semakin terspesialisasi sehingga menghasilkan output yang lebih besar. Akumulasi modal juga memungkinkan perluasan kapasitas produksi yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, teori ini memberikan dasar bahwa investasi pada sarana produksi dan infrastruktur merupakan faktor penting dalam mendorong aktivitas ekonomi (Smith, 1776).

2. Teori Harrod-Domar

   Harrod dan Domar mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tingkat tabungan dan investasi. Semakin besar investasi yang dilakukan, semakin besar pula penambahan stok modal yang akan meningkatkan kapasitas produksi. Sebaliknya, rendahnya investasi akan membatasi pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks pemerintah daerah, Belanja Modal dapat dipandang sebagai bentuk investasi publik yang berfungsi meningkatkan kapasitas produksi melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas umum. Oleh karena itu, teori Harrod-Domar memberikan dasar konseptual bahwa peningkatan investasi pemerintah berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Harrod, 1939; Domar, 1946).

3. Teori Pertumbuhan Neoklasik (Solow)

   Teori pertumbuhan neoklasik yang dikembangkan oleh Solow (1956) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Investasi berperan meningkatkan stok modal sehingga memperbesar kapasitas produksi. Namun, dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh penambahan modal, tetapi juga oleh peningkatan produktivitas yang didorong oleh kemajuan teknologi. Dalam penelitian ini, teori Solow menjadi salah satu landasan utama karena Belanja Modal pemerintah daerah merupakan bentuk investasi yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas ekonomi Kabupaten Gorontalo.

4. Teori Pertumbuhan Endogen

   Teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Romer (1986) menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam sistem ekonomi, seperti investasi pada infrastruktur, pendidikan, inovasi, kualitas sumber daya manusia, dan kebijakan pemerintah. Berbeda dengan teori neoklasik yang menganggap kemajuan teknologi sebagai faktor eksternal, teori pertumbuhan endogen memandang bahwa kebijakan publik dapat secara langsung meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks pemerintah daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah memberikan kapasitas fiskal yang lebih besar untuk membiayai investasi publik melalui Belanja Modal, sehingga berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Romer, 1986).

Keempat teori tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kombinasi antara akumulasi modal, investasi, produktivitas, dan kualitas kebijakan publik. Teori klasik memberikan dasar mengenai pentingnya modal dalam proses produksi, teori Harrod-Domar menegaskan peran investasi sebagai penggerak pertumbuhan, teori Solow menjelaskan hubungan antara modal dan produktivitas, sedangkan teori pertumbuhan endogen memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah dapat menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, teori-teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitian ini, Teori Pertumbuhan Neoklasik Solow (1956) digunakan sebagai grand theory karena paling sesuai untuk menjelaskan hubungan antara investasi pemerintah melalui Belanja Modal dan peningkatan kapasitas produksi daerah. Sementara itu, teori Harrod-Domar dan teori pertumbuhan endogen digunakan sebagai teori pendukung untuk menjelaskan pentingnya investasi publik dan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo.

c. Indikator Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Pengukuran pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk mengetahui perubahan kapasitas produksi suatu wilayah dari waktu ke waktu. Dalam analisis ekonomi regional, indikator yang paling banyak digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Indikator ini menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam suatu wilayah selama periode tertentu dengan menghilangkan pengaruh perubahan harga (inflasi), sehingga mampu menunjukkan pertumbuhan ekonomi riil (Badan Pusat Statistik, 2024).

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan PDRB sebagai jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha di suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB dapat disajikan berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku mencerminkan nilai produksi pada harga yang berlaku pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pada tahun dasar tertentu sehingga menggambarkan perubahan volume produksi secara riil tanpa dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga. Oleh karena itu, dalam penelitian pertumbuhan ekonomi, penggunaan

PDRB atas dasar harga konstan lebih tepat karena memberikan gambaran mengenai perkembangan aktivitas ekonomi yang sebenarnya.

Dalam praktiknya, laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Secara matematis, laju pertumbuhan ekonomi dirumuskan sebagai berikut.

$$PE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PE = Pertumbuhan ekonomi (%)

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan pada tahun ke-t

$PDRB_{t-1}$ = Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan pada tahun sebelumnya

Rumus tersebut menunjukkan persentase perubahan output riil suatu daerah dari satu periode ke periode berikutnya. Nilai pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan kontraksi ekonomi. Dengan demikian, indikator ini dapat digunakan untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi daerah secara objektif karena tidak dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga.

Selain sebagai ukuran peningkatan output, pertumbuhan ekonomi juga mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi secara lebih produktif. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan umumnya dipengaruhi oleh berkembangnya kegiatan produksi, meningkatnya investasi, bertambahnya kesempatan kerja, serta membaiknya kualitas infrastruktur dan pelayanan publik. Oleh karena itu, indikator pertumbuhan ekonomi sering digunakan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.

Dalam penelitian ini, indikator pertumbuhan ekonomi menggunakan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Gorontalo periode 2015–2024 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo. Pemilihan indikator tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa PDRB atas dasar harga konstan merupakan ukuran resmi yang digunakan pemerintah Indonesia dalam mengevaluasi perkembangan ekonomi daerah dan memungkinkan perbandingan antarperiode secara konsisten.

Dengan menggunakan indikator tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis apakah perubahan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal selama periode penelitian berkontribusi terhadap perubahan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo. Oleh karena itu, variabel pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai persentase pertumbuhan tahunan PDRB atas dasar harga konstan.

d. Faktor-faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang memengaruhi kapasitas suatu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa. Perkembangan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga dipengaruhi oleh investasi, kualitas sumber daya manusia, kemajuan teknologi, kebijakan pemerintah, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar daerah umumnya mencerminkan perbedaan dalam kemampuan memanfaatkan berbagai faktor produksi dan mengelola sumber daya yang dimiliki (Todaro & Smith, 2021).

Dalam teori pertumbuhan neoklasik, Solow (1956) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan aset produktif, sedangkan tenaga kerja dan teknologi meningkatkan efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Dalam konteks pembangunan daerah, investasi pemerintah melalui penyediaan infrastruktur menjadi salah satu bentuk akumulasi modal yang mampu meningkatkan produktivitas dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Berdasarkan teori ekonomi pembangunan, literatur ekonomi regional, dan praktik pembangunan daerah, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi sebagai berikut.

1. Investasi

   Investasi merupakan salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan modal fisik maupun modal manusia. Pada tingkat daerah, investasi dapat berasal dari sektor swasta maupun pemerintah. Belanja Modal pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk investasi publik yang berperan dalam penyediaan

infrastruktur dan fasilitas umum sehingga mampu meningkatkan produktivitas ekonomi serta menarik investasi swasta (Solow, 1956; Todaro & Smith, 2021).

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

   Kualitas sumber daya manusia memengaruhi kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output yang lebih tinggi. Pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja merupakan faktor yang menentukan daya saing ekonomi suatu daerah. Daerah dengan kualitas sumber daya manusia yang baik umumnya memiliki kemampuan lebih besar dalam memanfaatkan peluang ekonomi dan mengembangkan sektor-sektor produktif.

3. Infrastruktur

   Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, jaringan listrik, telekomunikasi, dan fasilitas publik lainnya berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas ekonomi. Infrastruktur yang memadai akan menurunkan biaya distribusi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempercepat arus barang dan jasa, serta memperkuat efisiensi kegiatan produksi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur melalui Belanja Modal menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Musgrave, 1959).

4. Kapasitas Fiskal Daerah

   Kapasitas fiskal mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun dan mengelola sumber-sumber penerimaan untuk membiayai pembangunan. Daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat memiliki ruang yang lebih besar untuk menyediakan pelayanan publik, membangun infrastruktur, dan melaksanakan berbagai program pembangunan. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu indikator kapasitas fiskal memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat (Oates, 1999; Halim, 2020).

5. Kebijakan Pemerintah

   Kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan fiskal daerah, berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, pengalokasian Belanja Modal secara produktif, serta tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan efektivitas pembangunan daerah. Sebaliknya, kebijakan fiskal yang kurang tepat dapat menghambat investasi, mengurangi efisiensi

penggunaan anggaran, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi (Mahmudi, 2019).

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam membentuk proses pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, pembangunan infrastruktur memerlukan kapasitas fiskal yang cukup, sedangkan kapasitas fiskal dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun Pendapatan Asli Daerah dan mengelola sumber-sumber penerimaan lainnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari sinergi antara faktor ekonomi, kebijakan publik, dan kualitas tata kelola pemerintahan.

Dalam konteks penelitian ini, berbagai faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi tidak seluruhnya dianalisis sebagai variabel penelitian. Penelitian ini secara khusus memfokuskan analisis pada Pendapatan Asli Daerah sebagai indikator kapasitas fiskal dan Belanja Modal sebagai bentuk investasi pemerintah daerah. Pemilihan kedua variabel tersebut didasarkan pada pertimbangan teoritis bahwa keduanya merupakan instrumen kebijakan fiskal yang secara langsung dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo.

e. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan fiskalnya secara efektif. Dalam sistem desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memperoleh kewenangan untuk menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengalokasikan anggaran pembangunan melalui Belanja Modal. Kedua instrumen tersebut memiliki keterkaitan yang erat karena Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kapasitas fiskal pemerintah daerah, sedangkan Belanja Modal merupakan bentuk pemanfaatan kapasitas fiskal tersebut untuk membiayai investasi publik yang diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat (Oates, 1972; Musgrave, 1959).

Dalam perspektif Fiscal Federalism, peningkatan Pendapatan Asli Daerah memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kemampuan menghimpun penerimaan daerah secara mandiri memungkinkan pemerintah meningkatkan investasi pada sektor-sektor produktif, terutama melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas pelayanan publik. Dengan demikian, PAD tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Oates, 1999).

Belanja Modal merupakan instrumen utama yang menerjemahkan kapasitas fiskal menjadi investasi publik. Melalui pembangunan jalan, jembatan, jaringan irigasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan berbagai sarana publik lainnya, pemerintah daerah menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan produktivitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, memperkuat konektivitas wilayah, serta meningkatkan daya tarik investasi. Infrastruktur yang memadai akan mempercepat aktivitas ekonomi sehingga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Musgrave, 1959; Halim, 2020).

Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai suatu proses yang saling berkaitan. Peningkatan PAD memperbesar kapasitas fiskal pemerintah daerah sehingga tersedia ruang anggaran yang lebih besar untuk membiayai Belanja Modal. Selanjutnya, Belanja Modal yang dialokasikan secara efektif akan menghasilkan infrastruktur dan fasilitas publik yang mampu meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi. Dengan demikian, PAD dan Belanja Modal tidak bekerja secara terpisah, tetapi saling melengkapi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Meskipun demikian, besarnya Pendapatan Asli Daerah maupun Belanja Modal tidak secara otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Efektivitas keduanya sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola keuangan daerah, ketepatan penentuan prioritas pembangunan, efisiensi pelaksanaan program, serta kemampuan pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap investasi publik memberikan manfaat ekonomi yang optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas fiskal harus diikuti dengan pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah (Mahmudi, 2019; Oates, 1999).

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih baik dan alokasi Belanja Modal yang lebih produktif cenderung

memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang masih menghadapi keterbatasan fiskal dan rendahnya investasi publik. Walaupun demikian, besarnya pengaruh kedua variabel tersebut tidak selalu sama pada setiap daerah karena dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi, kualitas kelembagaan, serta efektivitas implementasi kebijakan fiskal. Perbedaan kondisi tersebut menunjukkan pentingnya melakukan pengujian empiris pada konteks daerah tertentu agar hubungan antara kapasitas fiskal, investasi pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi dapat dipahami secara lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian teoritis tersebut, dapat dipahami bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal merupakan dua instrumen fiskal yang saling berkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah menyediakan kapasitas fiskal yang diperlukan untuk membiayai pembangunan, sedangkan Belanja Modal merupakan bentuk investasi pemerintah yang memanfaatkan kapasitas fiskal tersebut untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, kedua variabel tersebut dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo selama periode 2015–2024, sehingga diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi.

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan

Kajian penelitian yang relevan merupakan bagian penting dalam penyusunan penelitian ilmiah karena memberikan gambaran mengenai perkembangan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya pada bidang yang sama. Melalui kajian ini, peneliti dapat mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta temuan empiris yang berkaitan dengan variabel penelitian. Selain itu, kajian penelitian yang relevan berfungsi untuk menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan, menghindari duplikasi penelitian, serta memperkuat dasar ilmiah dalam penyusunan kerangka berpikir dan perumusan hipotesis (Creswell & Creswell, 2018).

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan pertumbuhan ekonomi disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 1. Kajian Penelitian yang Relevan

Peneliti	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode	Hasil penelitian
Badrudin & Kuncorojati (2017)	Menganalisis hubungan desentralisasi fiskal, PAD, dan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah	PAD, Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi	Analisis Data Panel	Kemandirian fiskal daerah berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Putra & Yasa (2019)	Menganalisis pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi serta pengangguran di Provinsi Bali	PAD, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi	Regresi Linear Berganda	PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Saputra, Haliah, & Indrijawati (2021)	Menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi dengan PAD sebagai variabel intervening	Belanja Modal, PAD, Pertumbuhan Ekonomi	Path Analysis	Belanja Modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah.
Tuwo, Rotinsulu, & Kawung (2021)	Menganalisis pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa	PAD, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi	Regresi Linear Berganda	PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Makawaehe, Walewangko, & Sumual (2023)	Menganalisis pengaruh PAD, Belanja Modal, dan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan	PAD, Belanja Modal, DAU, Pertumbuhan Ekonomi	Regresi Linear Berganda	PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

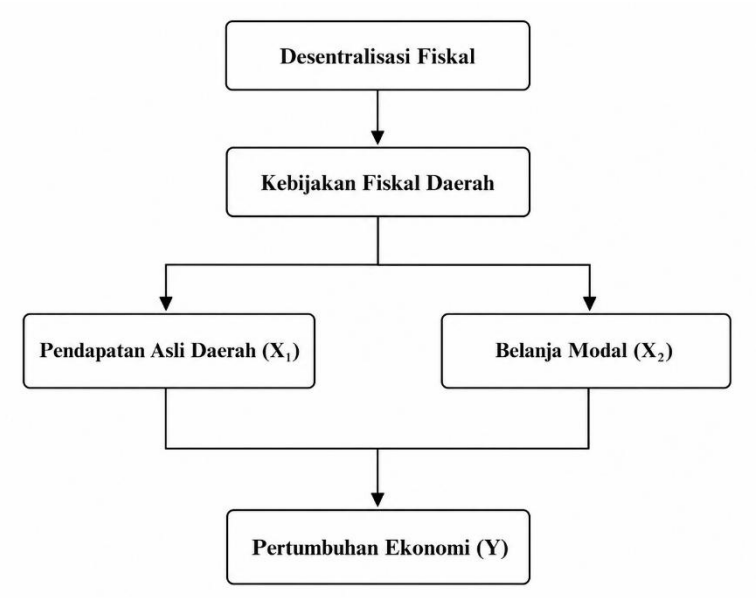
Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan PAD mencerminkan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Belanja Modal juga terbukti berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang mendukung peningkatan produktivitas ekonomi. Namun demikian, besarnya pengaruh Belanja Modal dapat berbeda pada setiap daerah, bergantung pada efektivitas pengelolaan anggaran dan karakteristik wilayah penelitian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian, yaitu Kabupaten Gorontalo dengan periode pengamatan 2015–2024.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada tingkat kabupaten sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang menjelaskan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber-sumber keuangan daerah melalui kebijakan pendapatan dan belanja guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah (Oates, 1972; Halim, 2020). Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam menghimpun penerimaan dari potensi ekonomi yang dimiliki. Kapasitas fiskal tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk melalui pengalokasian Belanja Modal. Belanja Modal merupakan investasi pemerintah daerah yang digunakan untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas publik yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperlancar aktivitas ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Musgrave, 1959; Mahmudi, 2019). Hubungan antarvariabel tersebut disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 4. Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara mengenai hubungan atau pengaruh antarvariabel yang disusun berdasarkan landasan teori, kerangka berpikir, dan hasil penelitian terdahulu. Hipotesis ini menjadi dasar yang akan diuji secara empiris melalui analisis statistik untuk mengetahui apakah dugaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, hipotesis disusun untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo periode 2015–2025.

Berdasarkan uraian teoritis dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H_1: Pendapatan Asli Daerah diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo.

H_2: Belanja Modal diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo.

H_3: Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal diduga secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kesesuaiannya dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengkaji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gorontalo.

Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama tiga bulan, yaitu mulai Mei sampai dengan Juli 2026. Kegiatan penelitian meliputi penyusunan proposal, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyusunan hasil penelitian, hingga penyelesaian laporan penelitian.

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No.	Kegiatan	Mei	Juni	Juli
1	Penyusunan Proposal	✓		
2	Pengumpulan Data	✓	✓	
3	Pengolahan dan Analisis Data		✓	✓
4	Penyusunan Hasil penelitian			✓
5	Penyelesaian Laporan Penelitian			✓

3.2 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksplanatori (*explanatory research*). Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan menguji pengaruh antarvariabel berdasarkan data numerik yang dianalisis menggunakan teknik statistik, sehingga hasil penelitian dapat diinterpretasikan secara objektif dan terukur (Creswell & Creswell, 2018; Sugiyono, 2022). Desain penelitian eksplanatori dipilih karena penelitian ini tidak hanya mendehasil penelitiankan fenomena yang diteliti, tetapi juga menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen berdasarkan kerangka teori serta hipotesis yang telah dirumuskan. Penelitian eksplanatori bertujuan memberikan penjelasan mengenai hubungan sebab akibat antarvariabel melalui pengujian empiris menggunakan data penelitian (Sekaran & Bougie, 2020).

Penelitian ini menggunakan data deret waktu (time series) selama periode 2015–2024. Penggunaan data time series memungkinkan peneliti menganalisis perkembangan variabel dari waktu ke waktu sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kecenderungan hubungan antarvariabel selama periode pengamatan (Gujarati & Porter, 2009).

3.3 Variabel dan Definisi Operasional Penelitian

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang menjadi objek penelitian dan memiliki variasi nilai sehingga dapat diukur atau diamati. Dalam penelitian kuantitatif, variabel digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang akan diuji secara empiris (Sugiyono, 2022; Creswell & Creswell, 2018). Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Belanja Modal (X_2), sedangkan variabel dependen adalah Pertumbuhan Ekonomi (Y).

3.3.1 Variabel Penelitian

1. Variabel Independen (X)

   Variabel independen merupakan variabel yang diduga memengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel dependen (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, variabel independen terdiri atas:

   a. Pendapatan Asli Daerah (X_1)
   b. Belanja Modal (X_2)

2. Variabel Dependen (Y)

   Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah Pertumbuhan Ekonomi (Y) yang diukur berdasarkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.

3.3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai cara setiap variabel diukur sehingga memiliki makna yang jelas dan dapat dianalisis secara empiris. Definisi operasional dalam penelitian ini disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Pendapatan Asli Daerah (X_1)	Seluruh penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri sesuai dengan	Nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp) per tahun	Rasio

	ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai indikator kapasitas fiskal daerah.		
Belanja Modal (X_2)	Pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran.	Nilai realisasi Belanja Modal (Rp) per tahun	Rasio
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Perkembangan aktivitas perekonomian daerah yang diukur berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari satu periode ke periode berikutnya.	Laju pertumbuhan PDRB ADHK (%) per tahun	Rasio

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sasaran penelitian (Sugiyono, 2022; Sekaran & Bougie, 2020). Dalam penelitian ini, populasi adalah seluruh data tahunan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo yang tersedia pada instansi resmi sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.4.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik populasi dan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian (Sugiyono, 2022). Karena penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk deret waktu (time series), maka teknik penentuan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh (total sampling). Teknik ini dipilih karena seluruh data yang memenuhi kriteria penelitian digunakan sebagai sampel.

Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini adalah seluruh data tahunan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo selama periode 2015–2024, sehingga diperoleh 10 observasi yang digunakan dalam analisis penelitian.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka dan dapat dianalisis menggunakan teknik statistik (Sugiyono, 2022). Data kuantitatif dalam penelitian ini terdiri atas data tahunan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo selama periode 2015–2024. Selain berdasarkan bentuknya, penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui dokumen, laporan, publikasi resmi, atau arsip yang telah diterbitkan oleh instansi terkait (Sekaran & Bougie, 2020). Penggunaan data sekunder dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian yang memanfaatkan data keuangan daerah dan indikator makroekonomi yang telah dipublikasikan secara resmi.

3.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari instansi pemerintah yang menerbitkan data resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sedangkan data Pertumbuhan Ekonomi diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo dalam bentuk data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Pemilihan sumber data tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa data yang diterbitkan oleh DJPK dan BPS merupakan data resmi pemerintah yang telah melalui proses pengelolaan dan verifikasi sehingga memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang memadai untuk digunakan dalam penelitian ilmiah (Badan Pusat Statistik, 2024; Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024).

3.6 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan tahapan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap dokumen, laporan, publikasi resmi, maupun arsip yang diterbitkan oleh instansi terkait (Sugiyono, 2022; Sekaran & Bougie, 2020). Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi kebutuhan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo selama periode 2015–2025.
2. Mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo untuk data Pertumbuhan Ekonomi.
3. Memeriksa kelengkapan, kesesuaian, dan konsistensi data yang diperoleh agar seluruh data berada pada periode pengamatan yang sama dan dapat digunakan dalam proses analisis.
4. Mengelompokkan dan menyusun data berdasarkan masing-masing variabel penelitian sehingga siap untuk diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis yang telah ditentukan.

Melalui prosedur tersebut, data yang digunakan dalam penelitian diharapkan memiliki tingkat kelengkapan dan konsistensi yang memadai sehingga dapat mendukung proses analisis serta menghasilkan temuan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah..

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk menjawab tujuan penelitian serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics. Analisis dilakukan terhadap data deret waktu (time series) periode 2015–2025 untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo (Ghozali, 2021; Gujarati & Porter, 2009).

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data penelitian tanpa melakukan penarikan kesimpulan secara umum. Statistik deskriptif menyajikan informasi seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi sehingga dapat memberikan gambaran mengenai distribusi data setiap variabel penelitian (Ghozali, 2021).

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda, data harus memenuhi asumsi klasik agar model regresi menghasilkan estimator yang bersifat tidak bias (Best Linear Unbiased Estimator/BLUE) (Gujarati & Porter, 2009). Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Uji Normalitas

   Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data atau residual dalam model regresi berdistribusi normal. Pengujian dilakukan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi (Asymp. Sig.) lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2021).

b. Uji Multikolinearitas

   Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik tidak mengalami multikolinearitas. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Model dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10 (Ghozali, 2021).

c. Uji Heteroskedastisitas

   Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual pada model regresi. Pengujian dilakukan menggunakan Uji Glejser. Model regresi dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2021).

d. Uji Autokorelasi

   Karena penelitian ini menggunakan data time series, uji autokorelasi perlu dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada periode yang berbeda. Pengujian dilakukan menggunakan Durbin-Watson (DW Test). Model regresi dikatakan bebas dari autokorelasi apabila nilai Durbin-Watson berada pada daerah yang menunjukkan tidak adanya autokorelasi berdasarkan nilai batas bawah (dL) dan batas atas (dU) pada tabel Durbin-Watson (Gujarati & Porter, 2009).

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo. Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan Ekonomi

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Belanja Modal

e = Error

Model regresi digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Gujarati & Porter, 2009).

3.7.4 Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

   Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 5% (α = 0,05). Hipotesis diterima apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau nilai t hitung lebih besar daripada t tabel (Ghozali, 2021).

b. Uji Simultan (Uji F)

   Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau nilai F hitung lebih besar daripada F tabel (Ghozali, 2021).

3.7.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada pada rentang 0 sampai 1. Semakin besar nilai R^2, semakin besar pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian (Ghozali, 2021).

3.8 Hipotesis Statistik

Hipotesis statistik merupakan pernyataan yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) untuk diuji berdasarkan data

penelitian. Pengujian hipotesis statistik bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui analisis statistik pada tingkat signifikansi tertentu (Ghozali, 2021; Sugiyono, 2022). Berdasarkan hipotesis penelitian yang telah dirumuskan pada Bab II, maka hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi
   H_{01}: $\beta_1 = 0$, artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo.
   H_{a1}: $\beta_1 \neq 0$, artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo.
2. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi
   H_{02}: $\beta_2 = 0$, artinya Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo.
   H_{a2}: $\beta_2 \neq 0$, artinya Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo.
3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi
   H_{03}: $\beta_1 = \beta_2 = 0$, artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal secara simultan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo.
   H_{a3}: Minimal terdapat satu $\beta_i \neq 0$, artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo.

.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1 Hasil

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Gorontalo

A. Kondisi Geografis dan Administratif

Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo yang memiliki peran penting sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perekonomian, dan pembangunan wilayah. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi. Sejak tahun 1978, pusat pemerintahan Kabupaten Gorontalo berkedudukan di Kecamatan Limboto (BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, 2025). Secara geografis, Kabupaten Gorontalo memiliki luas wilayah sekitar 2.125,47 km² atau sekitar 15,55 persen dari luas wilayah Provinsi Gorontalo. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara di sebelah utara, Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango di sebelah timur, Teluk Tomini di sebelah selatan, serta Kabupaten Boalemo di sebelah barat. Posisi geografis tersebut menjadikan Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu wilayah yang strategis dalam mendukung mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta aktivitas perekonomian di Provinsi Gorontalo (BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, 2025).

Berdasarkan publikasi Statistik Daerah Kabupaten Gorontalo 2025, secara administratif Kabupaten Gorontalo terdiri atas 19 kecamatan dengan 205 desa dan 11 kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Pembagian wilayah administratif tersebut menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo, 2025). Karakteristik geografis dan administratif Kabupaten Gorontalo memberikan tantangan sekaligus peluang dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sebaran penduduk, kondisi topografi, serta perbedaan karakteristik antarwilayah menyebabkan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik menjadi beragam. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola kapasitas fiskal secara efektif melalui optimalisasi Pendapatan Asli

Daerah dan pengalokasian Belanja Modal yang tepat sasaran sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

B. Gambaran Perekonomian Daerah

Perekonomian Kabupaten Gorontalo menunjukkan perkembangan yang relatif positif dalam beberapa tahun terakhir, meskipun sempat mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, nilai perekonomian Kabupaten Gorontalo pada tahun 2025 mencapai Rp18,50 triliun, dengan PDRB per kapita sebesar Rp44,74 juta. Pada tahun yang sama, laju pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,35 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 4,11 persen. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya pemulihan aktivitas ekonomi seiring membaiknya konsumsi masyarakat, investasi, dan kegiatan produksi di berbagai sektor ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo didukung oleh peningkatan kinerja beberapa lapangan usaha, terutama sektor transportasi dan pergudangan yang mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 11,85 persen pada tahun 2025. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga yang tetap menjadi komponen terbesar dalam struktur perekonomian daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kabupaten Gorontalo mulai kembali stabil setelah mengalami tekanan selama masa pandemi, sehingga memberikan prospek yang lebih baik bagi pembangunan ekonomi daerah pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun demikian, struktur perekonomian Kabupaten Gorontalo masih didominasi oleh sektor-sektor berbasis sumber daya alam, khususnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ketergantungan terhadap sektor primer menyebabkan kinerja ekonomi daerah cukup dipengaruhi oleh kondisi cuaca, produktivitas pertanian, serta fluktuasi harga komoditas. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pembangunan melalui penguatan infrastruktur, peningkatan investasi, serta optimalisasi pengelolaan keuangan daerah agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan lebih inklusif.

Berkembangnya aktivitas ekonomi daerah juga memerlukan dukungan kapasitas fiskal yang memadai. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengalokasian Belanja Modal yang efektif diharapkan mampu memperkuat penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik sehingga dapat menciptakan iklim

investasi yang kondusif serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kondisi perekonomian Kabupaten Gorontalo menjadi landasan penting dalam menganalisis hubungan antara PAD, Belanja Modal, dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi fokus penelitian ini.

C. Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha

Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha memberikan gambaran mengenai sektor-sektor ekonomi yang menjadi penopang utama aktivitas perekonomian suatu daerah. Komposisi tersebut mencerminkan karakteristik ekonomi Kabupaten Gorontalo serta menunjukkan sektor-sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan nilai tambah regional. Informasi mengenai struktur PDRB penting untuk memahami arah pembangunan ekonomi daerah dan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan fiskal, khususnya yang berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengalokasian Belanja Modal. Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo Tahun 2025, distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4. Struktur PDRB Kabupaten Gorontalo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2025

Lapangan Usaha	Distribusi (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38,29
Konstruksi	14,19
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,69
Transportasi dan Pergudangan	9,13
Lainnya	26,70
Total	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo (2025), Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 4, struktur perekonomian Kabupaten Gorontalo pada tahun 2025 masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 38,29 persen terhadap total PDRB. Besarnya kontribusi sektor tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih bertumpu pada sektor primer yang memanfaatkan potensi sumber daya alam. Kondisi ini menggambarkan bahwa sektor pertanian tetap menjadi penggerak utama perekonomian sekaligus penyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Gorontalo.

Kontributor terbesar berikutnya adalah sektor Konstruksi dengan pangsa sebesar 14,19 persen, diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,69 persen, serta sektor Transportasi dan

Pergudangan sebesar 9,13 persen. Sementara itu, kelompok sektor ekonomi lainnya secara kumulatif memberikan kontribusi sebesar 26,70 persen terhadap pembentukan PDRB. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun sektor jasa, perdagangan, dan konstruksi terus berkembang, struktur ekonomi Kabupaten Gorontalo masih didominasi oleh sektor berbasis sumber daya alam.

Struktur ekonomi tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan fiskal pemerintah daerah. Dominasi sektor pertanian menunjukkan perlunya dukungan investasi pemerintah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas wilayah, serta penyediaan sarana dan prasarana publik yang memadai agar produktivitas sektor unggulan tetap terjaga sekaligus mendorong berkembangnya sektor-sektor ekonomi lainnya. Dalam konteks penelitian ini, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah, sedangkan alokasi Belanja Modal menjadi instrumen penting dalam penyediaan infrastruktur yang mampu mendorong aktivitas ekonomi, meningkatkan investasi, dan pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo.

D. Kondisi Fiskal Daerah Secara Umum

Kondisi fiskal daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh sumber-sumber pendapatan serta mengalokasikan belanja untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kapasitas fiskal yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam penelitian ini, kondisi fiskal Kabupaten Gorontalo dianalisis melalui dua indikator utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal, karena kedua variabel tersebut merupakan fokus penelitian dan memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Tabel 5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Kabupaten Gorontalo Tahun 2015–2025 (dalam miliar rupiah)

Tahun	PAD	Belanja Modal
2015	113,22	192,55
2016	125,27	192,89
2017	190,43	157,77
2018	147,99	281,06
2019	155,47	254,33
2020	128,16	167,35
2021	122,47	353,57
2022	128,46	300,98

2023	144,90	176,91
2024	164,77	170,39
2025	190,27	100,33

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), data diolah (2026).

Berdasarkan Tabel 5, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo selama periode 2015–2025 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. PAD meningkat dari Rp113,22 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp190,43 miliar pada tahun 2017, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 hingga 2021. Penurunan tersebut tidak terlepas dari perlambatan aktivitas ekonomi, terutama pada masa pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, serta sumber-sumber pendapatan lainnya. Memasuki tahun 2022 hingga 2025, PAD kembali mengalami peningkatan secara bertahap hingga mencapai Rp190,27 miliar pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya pemulihan kapasitas fiskal daerah seiring membaiknya aktivitas ekonomi dan meningkatnya optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah.

Sementara itu, Belanja Modal Kabupaten Gorontalo juga memperlihatkan pola yang berfluktuasi. Pada tahun 2015 hingga 2017, nilai Belanja Modal relatif stabil sebelum meningkat menjadi Rp281,06 miliar pada tahun 2018. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2020, Belanja Modal meningkat cukup signifikan pada tahun 2021 hingga mencapai Rp353,57 miliar, yang merupakan nilai tertinggi selama periode penelitian. Peningkatan tersebut menunjukkan besarnya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi pascapandemi. Namun demikian, pada periode 2022–2025 Belanja Modal kembali mengalami penurunan hingga mencapai Rp100,33 miliar pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan adanya penyesuaian prioritas belanja pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan fiskal dan arah kebijakan pembangunan.

Secara umum, perkembangan PAD dan Belanja Modal Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Meskipun kedua indikator tersebut berfluktuasi, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga kesinambungan pembangunan melalui pengelolaan pendapatan dan pengalokasian belanja yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah. Dinamika fiskal tersebut menjadi dasar yang relevan untuk menganalisis pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Gorontalo pada periode 2015–2025, yang selanjutnya akan dibahas melalui analisis statistik pada subbab berikutnya.

4.1.2 Analisis Statistik

Analisis statistik dilakukan untuk mengetahui karakteristik data penelitian serta menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo periode 2015–2025. Analisis diawali dengan statistik deskriptif, dilanjutkan dengan pengujian asumsi klasik, dan diakhiri dengan analisis regresi linear berganda beserta pengujian hipotesis. Seluruh pengolahan data dilakukan menggunakan program IBM SPSS Statistics.

1. Statistik deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik masing-masing variabel penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. Hasil analisis statistik deskriptif disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11	113,22	190,43	146,4918	26,57480
Belanja Modal	11	100,33	353,57	213,4664	74,57068
Pertumbuhan Ekonomi	11	-0,01	6,78	4,7873	2,10910

Sumber: Hasil olahan data menggunakan IBM SPSS Statistics (2026)

Berdasarkan Tabel 6, jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 11 data, yaitu data tahunan selama periode 2015–2025. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum sebesar 113,22 miliar rupiah dan maksimum sebesar 190,43 miliar rupiah, dengan nilai rata-rata sebesar 146,49 miliar rupiah serta standar deviasi sebesar 26,57. Hal ini menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Gorontalo mengalami fluktuasi selama periode penelitian, namun penyimpangannya terhadap nilai rata-rata masih relatif moderat.

Variabel Belanja Modal memiliki nilai minimum sebesar 100,33 miliar rupiah dan maksimum sebesar 353,57 miliar rupiah, dengan rata-rata sebesar 213,47 miliar rupiah serta standar deviasi sebesar 74,57. Nilai standar deviasi yang relatif besar menunjukkan bahwa alokasi Belanja Modal mengalami perubahan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun, terutama pada masa pandemi Covid-19 dan periode pemulihan ekonomi. Sementara itu, variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai minimum sebesar -0,01 persen dan maksimum sebesar 6,78 persen,

dengan rata-rata sebesar 4,79 persen serta standar deviasi sebesar 2,11. Nilai minimum terjadi pada tahun 2020 sebagai dampak perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi kembali menunjukkan tren pemulihan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa dinamika ekonomi selama periode penelitian dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi nasional maupun regional yang berdampak terhadap aktivitas perekonomian Kabupaten Gorontalo.

Secara umum, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian mengalami fluktuasi selama periode 2015–2025. Fluktuasi tersebut mencerminkan dinamika kapasitas fiskal pemerintah daerah serta perubahan kondisi perekonomian, khususnya akibat pandemi Covid-19 yang memengaruhi penerimaan daerah, pengalokasian belanja pemerintah, dan laju pertumbuhan ekonomi.

2. Uji asumsi klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi persyaratan sebagai estimator yang baik (Best Linear Unbiased Estimator/B.L.U.E.). Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi

a. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data atau residual dalam model regresi berdistribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan taraf signifikansi sebesar 5% (α = 0,05). Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal. Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,200	Normal
Belanja Modal	0,064	Normal
Pertumbuhan Ekonomi	0,200	Normal

Sumber: Hasil olahan data menggunakan IBM SPSS Statistics.

Berdasarkan Tabel 7, seluruh variabel penelitian memiliki nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05, yaitu PAD sebesar 0,200, Belanja Modal sebesar 0,064, dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,200. Dengan demikian,

dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal sehingga memenuhi salah satu asumsi dasar dalam analisis regresi linear berganda.

b. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,712	1,404	Tidak terjadi multikolinearitas
Belanja Modal	0,712	1,404	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Hasil olahan data menggunakan IBM SPSS Statistics (2026)

Berdasarkan Tabel 8, kedua variabel independen memiliki nilai Tolerance sebesar 0,712, yang lebih besar dari 0,10, serta nilai VIF sebesar 1,404, yang jauh lebih kecil dari 10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang tinggi antara variabel Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi bebas dari multikolinearitas.

c. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual pada model regresi. Pengujian dilakukan menggunakan Uji Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Model regresi dikatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari 0,05. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Glejser)

Variabel	Sig.	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,032	Terindikasi heteroskedastisitas
Belanja Modal	0,170	Tidak terindikasi heteroskedastisitas

Sumber: Hasil olahan data menggunakan IBM SPSS Statistics (2026).

Berdasarkan Tabel 9, variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,032, yaitu lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan

adanya indikasi heteroskedastisitas. Sementara itu, variabel Belanja Modal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,170, yang lebih besar dari 0,05, sehingga tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa model regresi masih memiliki indikasi heteroskedastisitas pada salah satu variabel independen. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh fluktuasi PAD selama periode penelitian, terutama pada masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan cukup tajam pada aktivitas ekonomi dan penerimaan daerah. Selain itu, jumlah observasi yang relatif terbatas, yaitu 11 data tahunan, juga dapat memengaruhi kestabilan varians residual dalam model regresi. Oleh karena itu, hasil analisis regresi pada penelitian ini perlu diinterpretasikan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi empiris yang terjadi selama periode pengamatan.

d. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada suatu periode dengan residual pada periode sebelumnya. Pengujian dilakukan menggunakan statistik Durbin-Watson (DW). Hasil uji autokorelasi disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 10. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
Regresi	1,036

Sumber: Hasil olahan data menggunakan IBM SPSS Statistics (2026).

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,036. Nilai tersebut berada di sekitar angka 2, namun cenderung lebih rendah, sehingga mengindikasikan adanya kemungkinan korelasi positif yang lemah pada residual. Mengingat penelitian ini menggunakan data deret waktu dengan jumlah observasi yang relatif sedikit, hasil uji Durbin-Watson perlu ditafsirkan secara hati-hati. Secara keseluruhan, hasil uji ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menginterpretasikan hasil regresi, tanpa mengurangi validitas data yang digunakan sebagai data resmi pemerintah.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo, baik secara parsial maupun simultan. Model regresi dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y=\alpha+\beta_1X_1+\beta_2X_2+e$$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan Ekonomi

α = Konstanta

β1 = Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

β2 = Koefisien regresi Belanja Modal

X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2 = Belanja Modal

e = Error (kesalahan pengganggu)

Hasil analisis regresi linear berganda menggunakan IBM SPSS Statistics disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 11. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien (B)	t	Sig.
Konstanta	0,747	0,119	0,908
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,026	0,840	0,425
Belanja Modal	0,001	0,069	0,947

Sumber: Hasil olahan data menggunakan IBM SPSS Statistics (2026).

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.8, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,747 + 0,026X_1 + 0,001X_2$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal diasumsikan bernilai konstan, maka nilai Pertumbuhan Ekonomi diperkirakan sebesar 0,747 persen. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,026 bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan PAD sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel lain tetap, diperkirakan akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,026 satuan. Hubungan positif tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah cenderung diikuti oleh peningkatan aktivitas ekonomi. Namun demikian, berdasarkan hasil pengujian statistik, pengaruh tersebut belum menunjukkan signifikansi pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Selanjutnya, koefisien regresi Belanja Modal sebesar 0,001 juga bernilai positif. Artinya, setiap peningkatan Belanja Modal sebesar satu satuan diperkirakan akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,001 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Meskipun arah hubungan menunjukkan pengaruh positif, besarnya koefisien tersebut relatif kecil sehingga kontribusi

Belanja Modal terhadap perubahan Pertumbuhan Ekonomi dalam periode penelitian belum terlihat kuat secara statistik.

Secara umum, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa baik Pendapatan Asli Daerah maupun Belanja Modal memiliki arah hubungan yang positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo. Temuan ini sejalan dengan teori keuangan daerah yang menyatakan bahwa peningkatan kapasitas fiskal dan investasi pemerintah melalui Belanja Modal berpotensi mendorong aktivitas ekonomi. Akan tetapi, berdasarkan hasil estimasi model, pengaruh kedua variabel tersebut masih relatif lemah. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi selama periode penelitian, terutama akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020, serta adanya faktor-faktor lain di luar model penelitian, seperti investasi swasta, konsumsi masyarakat, kualitas sumber daya manusia, dan kondisi makroekonomi yang turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo.

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal, dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen, yaitu Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo. Nilai koefisien determinasi berada pada rentang 0 sampai dengan 1. Semakin besar nilai R^2, semakin besar pula kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil pengujian koefisien determinasi menggunakan IBM SPSS Statistics disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 12. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,320	0,102	-0,122	2,23443

Sumber: Hasil olahan data menggunakan IBM SPSS Statistics (2026).

Berdasarkan Tabel 12, diperoleh nilai R Square (R^2) sebesar 0,102 atau 10,2 persen. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo sebesar 10,2 persen. Sementara itu, 89,8 persen sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Nilai koefisien determinasi yang relatif rendah mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya.

Faktor-faktor tersebut antara lain investasi swasta, konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah selain Belanja Modal, kualitas sumber daya manusia, tingkat inflasi, kondisi pasar tenaga kerja, perkembangan sektor unggulan daerah, serta kebijakan ekonomi nasional dan regional.

Selain itu, rendahnya nilai koefisien determinasi juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik data penelitian yang menggunakan data deret waktu selama 11 tahun (2015–2025). Dalam periode tersebut terjadi guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi pada tahun 2020 dan proses pemulihan pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi tersebut mengakibatkan hubungan antara variabel fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi menjadi kurang stabil dibandingkan pada kondisi ekonomi normal.

Meskipun demikian, nilai koefisien determinasi yang relatif kecil tidak mengurangi validitas penelitian. Dalam penelitian ekonomi daerah, khususnya yang menggunakan data sekunder dengan jumlah observasi terbatas, nilai R^2 yang rendah masih dapat diterima karena fenomena pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor yang kompleks dan saling berkaitan. Oleh karena itu, interpretasi hasil penelitian tidak hanya didasarkan pada besarnya nilai koefisien determinasi, tetapi juga mempertimbangkan teori yang digunakan, kondisi empiris daerah, dan hasil pengujian statistik secara keseluruhan.

5. Uji t

Uji parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal, terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo secara individual. Pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 5 persen ($\alpha = 0,05$). Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

a. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
b. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil uji parsial disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 13. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	t hitung	Sig.	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,840	0,425	Tidak signifikan
Belanja Modal	0,069	0,947	Tidak signifikan

Sumber: Hasil olahan data menggunakan IBM SPSS Statistics 2026).

Berdasarkan Tabel 13, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,425, lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, secara parsial PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo selama periode penelitian. Meskipun koefisien regresinya bernilai positif, peningkatan PAD belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, variabel Belanja Modal memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,947, yang juga lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo selama periode 2015–2025. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi Belanja Modal belum secara langsung diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam periode yang sama.

Hasil uji parsial ini menunjukkan bahwa meskipun PAD dan Belanja Modal memiliki hubungan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, pengaruhnya belum signifikan secara statistik. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya jeda waktu (time lag) antara realisasi pendapatan maupun belanja pemerintah dengan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi. Selain itu, pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan perlambatan ekonomi yang cukup tajam, sehingga hubungan antara variabel fiskal dan pertumbuhan ekonomi menjadi kurang kuat selama periode penelitian. Di samping itu, masih terdapat faktor-faktor lain di luar model yang memiliki kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

6. Uji F

Uji simultan (Uji F) bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal, secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo. Pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 5 persen ($\alpha = 0,05$). Dasar pengambilan keputusan dalam uji F adalah sebagai berikut:

a. Apabila nilai signifikansi (Sig.) < 0,05, maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
b. Apabila nilai signifikansi (Sig.) > 0,05, maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil uji simultan (Uji F) disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 14. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	F hitung	Sig.	Keterangan
Regresi	0,455	0,650	Tidak signifikan

Sumber: Hasil olahan data menggunakan IBM SPSS Statistics (2026).

Berdasarkan Tabel 14, diperoleh nilai F hitung sebesar 0,455 dengan nilai signifikansi 0,650. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo selama periode 2015–2025. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa PAD dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi ditolak, sedangkan hipotesis nol (H_0) diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan PAD dan Belanja Modal dalam menjelaskan perubahan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo masih relatif terbatas. Temuan tersebut sejalan dengan hasil koefisien determinasi (R^2) yang menunjukkan bahwa kedua variabel hanya mampu menjelaskan 10,2 persen variasi pertumbuhan ekonomi, sedangkan 89,8 persen sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Faktor-faktor tersebut dapat berupa investasi swasta, konsumsi rumah tangga, tenaga kerja, inflasi, perkembangan sektor unggulan daerah, kualitas infrastruktur, serta berbagai kebijakan ekonomi pada tingkat nasional maupun daerah.

Selain itu, hasil uji simultan ini juga dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang terjadi selama periode penelitian. Tahun 2020 merupakan periode terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi, penurunan aktivitas usaha, serta perubahan prioritas pengelolaan keuangan daerah. Kondisi tersebut berdampak pada fluktuasi PAD, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi sehingga hubungan antarvariabel menjadi kurang stabil. Dengan jumlah observasi yang relatif terbatas, yaitu 11 data tahunan, dinamika tersebut berpotensi memengaruhi kekuatan model regresi dalam mendeteksi pengaruh yang signifikan. Meskipun demikian, hasil penelitian ini tetap memberikan informasi empiris mengenai kondisi fiskal Kabupaten Gorontalo. Arah koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa peningkatan PAD dan Belanja Modal tetap memiliki kecenderungan mendukung pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, pada periode penelitian ini pengaruh tersebut belum cukup kuat untuk dinyatakan signifikan secara statistik. Oleh karena itu, upaya peningkatan

pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada optimalisasi PAD dan Belanja Modal, tetapi juga memerlukan dukungan dari faktor-faktor ekonomi lainnya yang mampu memperkuat aktivitas ekonomi daerah.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo selama periode 2015-2025. Meskipun demikian, koefisien regresi menunjukkan arah hubungan yang positif, sehingga mengindikasikan bahwa peningkatan PAD cenderung diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, pengaruh tersebut belum cukup kuat untuk dinyatakan signifikan secara statistik. Dengan demikian, PAD belum menjadi faktor yang secara langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo selama periode penelitian.

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui Teori Desentralisasi Fiskal yang dikemukakan oleh Oates (1972). Teori tersebut menjelaskan bahwa pelimpahan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah bertujuan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Dalam konteks tersebut, Pendapatan Asli Daerah dipandang sebagai indikator kemandirian fiskal karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghimpun PAD, semakin besar pula ruang fiskal yang dimiliki untuk mendukung pembangunan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat. Selain itu, Musgrave (1959) menjelaskan bahwa salah satu fungsi utama pemerintah adalah fungsi alokasi (*allocation function*), yaitu menyediakan barang dan pelayanan publik yang tidak dapat dipenuhi secara optimal oleh mekanisme pasar. Dalam konteks pemerintahan daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk menjalankan fungsi tersebut melalui penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pelaksanaan program pembangunan yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, secara konseptual peningkatan PAD

diharapkan mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun demikian, peningkatan PAD tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada besarnya kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah serta efektivitas pemanfaatannya dalam membiayai kegiatan yang bersifat produktif. Dengan demikian, peningkatan penerimaan daerah perlu diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang efisien, tepat sasaran, dan mampu menciptakan nilai tambah bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut tercermin pada Kabupaten Gorontalo. Selama periode penelitian, struktur perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Di sisi lain, kemampuan fiskal daerah masih didukung oleh dana transfer dari pemerintah pusat sehingga kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah relatif terbatas. Akibatnya, peningkatan PAD yang terjadi selama periode penelitian belum mampu menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, periode penelitian juga mencakup masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi pada tahun 2020. Meskipun PAD kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya, proses pemulihan ekonomi berlangsung secara bertahap sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi belum terlihat secara signifikan.

Hasil penelitian ini dapat dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah dikaji pada Bab II. Badrudin dan Kuncorojati (2017) menemukan bahwa kemandirian fiskal daerah yang tercermin melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, Putra dan Yasa (2019) menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Hasil yang serupa juga dilaporkan oleh Tuwo, Rotinsulu, dan Kawung (2021) pada Kabupaten Minahasa serta Makawaehe, Walewangko, dan Sumual (2023) di Provinsi Sulawesi Selatan yang menunjukkan bahwa PAD memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah dapat memperkuat kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan sehingga mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi.

Meskipun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan kondisi yang berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh karakteristik fiskal dan struktur ekonomi masing-masing daerah. Pada Kabupaten Gorontalo, tingkat ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih relatif tinggi sehingga peningkatan PAD belum menjadi sumber pembiayaan utama dalam pembangunan daerah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi daerah juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain di luar Pendapatan Asli Daerah, seperti investasi swasta, produktivitas sektor pertanian, kualitas sumber daya manusia, tingkat konsumsi masyarakat, perkembangan teknologi, kondisi harga komoditas, serta dinamika ekonomi nasional. Oleh karena itu, peningkatan PAD belum cukup untuk menjadi faktor dominan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan selama periode penelitian.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dipahami bahwa tidak signifikannya pengaruh Pendapatan Asli Daerah bukan berarti PAD tidak memiliki peran dalam pembangunan ekonomi daerah. Sebaliknya, temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan PAD lebih menentukan dibandingkan besarnya PAD itu sendiri. Peningkatan penerimaan daerah akan memberikan dampak yang lebih besar apabila diikuti dengan pengalokasian anggaran pada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sektor unggulan daerah, serta pemberdayaan pelaku usaha. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo perlu terus meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang disertai dengan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pembangunan produktif sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

4.2.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo selama periode 2015-2025. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi Belanja Modal lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga secara statistik Belanja Modal

belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun demikian, koefisien regresi menunjukkan arah hubungan yang positif, yang mengindikasikan bahwa peningkatan Belanja Modal cenderung diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi, walaupun pengaruh tersebut relatif kecil.

Secara teoritis, Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal dialokasikan untuk memperoleh aset tetap seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap lainnya yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam perspektif keuangan publik, Musgrave (1959) menjelaskan bahwa pemerintah memiliki fungsi alokasi (*allocation function*), yaitu menyediakan barang dan infrastruktur publik yang tidak dapat dipenuhi secara optimal oleh mekanisme pasar. Selanjutnya, Rostow dan Musgrave (1959) menjelaskan bahwa pada tahap pembangunan ekonomi, peningkatan investasi pemerintah melalui Belanja Modal menjadi instrumen penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi karena mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas masyarakat.

Sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi, Todaro dan Smith (2020) menjelaskan bahwa investasi pemerintah pada infrastruktur mampu meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi, memperlancar distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya transaksi, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Oleh karena itu, Belanja Modal diharapkan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, pengaruh Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi umumnya tidak terjadi secara langsung. Infrastruktur yang dibangun memerlukan waktu untuk diselesaikan, dimanfaatkan, dan menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, efektivitas Belanja Modal juga dipengaruhi oleh ketepatan perencanaan, kualitas pelaksanaan pembangunan, efisiensi penggunaan anggaran, serta kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan daerah. Dengan demikian, peningkatan alokasi Belanja Modal belum tentu langsung diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama.

Kondisi tersebut tercermin pada Kabupaten Gorontalo. Selama periode penelitian, Belanja Modal mengalami fluktuasi yang cukup besar sebagai akibat perubahan kebijakan fiskal dan penyesuaian prioritas pembangunan daerah. Pada masa pandemi Covid-19, sebagian anggaran pemerintah dialihkan untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan program pemulihan ekonomi sehingga ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur menjadi lebih terbatas. Selain itu, struktur perekonomian Kabupaten Gorontalo masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya Belanja Modal, tetapi juga oleh produktivitas sektor primer, kondisi iklim, harga komoditas, investasi swasta, dan tingkat konsumsi masyarakat.

Hasil penelitian ini dapat dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah dikaji pada Bab II. Putra dan Yasa (2019) menyimpulkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena pembangunan infrastruktur mampu meningkatkan produktivitas dan aktivitas ekonomi daerah. Selanjutnya, Saputra, Haliah, dan Indrijawati (2021) menemukan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah, yang menunjukkan bahwa investasi pemerintah dapat memberikan dampak ekonomi apabila didukung oleh pengelolaan fiskal yang baik. Hasil serupa juga diperoleh Tuwo, Rotinsulu, dan Kawung (2021) serta Makawaehe, Walewangko, dan Sumual (2023) yang menyimpulkan bahwa Belanja Modal memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara Belanja Modal dan pertumbuhan ekonomi bersifat kontekstual. Pada Kabupaten Gorontalo, manfaat ekonomi dari Belanja Modal diduga belum sepenuhnya dirasakan dalam periode penelitian karena sebagian investasi pemerintah memerlukan waktu untuk menghasilkan dampak terhadap aktivitas ekonomi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi daerah juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain di luar model penelitian, seperti investasi swasta, kualitas sumber daya manusia, produktivitas sektor pertanian, kondisi pasar, dan stabilitas ekonomi secara umum. Dengan demikian,

Belanja Modal bukan satu-satunya faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dipahami bahwa tidak signifikannya pengaruh Belanja Modal bukan berarti Belanja Modal tidak memiliki peran dalam pembangunan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas Belanja Modal lebih ditentukan oleh kualitas perencanaan, ketepatan sasaran program, serta keberhasilan pemanfaatan aset yang dibangun dibandingkan dengan besarnya alokasi anggaran semata. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo perlu memastikan bahwa Belanja Modal diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor-sektor unggulan daerah, khususnya sektor pertanian, perdagangan, dan jasa, sehingga mampu menciptakan multiplier effect, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

4.2.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo selama periode 2015-2025. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut belum mampu menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi secara signifikan dalam model penelitian. Hasil ini juga didukung oleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,102, yang menunjukkan bahwa PAD dan Belanja Modal hanya mampu menjelaskan 10,2% variasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo, sedangkan 89,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Secara teoritis, teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Oates (1972) menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber-sumber keuangan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik dan pembangunan ekonomi. Dalam kerangka tersebut, PAD merupakan indikator kemampuan daerah dalam menghimpun pendapatan sendiri, sedangkan Belanja Modal merupakan instrumen pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya fiskal dalam bentuk investasi publik. Keduanya diharapkan saling melengkapi sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas,

pembangunan infrastruktur, serta penyediaan layanan publik yang lebih baik. Selain itu, Musgrave (1959) menjelaskan bahwa fungsi alokasi pemerintah diwujudkan melalui penyediaan barang dan jasa publik yang mampu meningkatkan efisiensi perekonomian. Apabila kemampuan fiskal daerah meningkat melalui PAD dan diikuti dengan alokasi Belanja Modal yang efektif, maka pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik diharapkan mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih produktif. Oleh karena itu, secara konseptual PAD dan Belanja Modal memiliki keterkaitan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut belum terjadi secara optimal di Kabupaten Gorontalo. Selama periode penelitian, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan dana transfer pemerintah pusat. Di sisi lain, Belanja Modal mengalami fluktuasi sebagai akibat perubahan prioritas pembangunan dan penyesuaian kebijakan fiskal, terutama pada masa pandemi Covid-19. Kondisi tersebut menyebabkan kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya mampu menghasilkan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Karakteristik perekonomian Kabupaten Gorontalo juga turut memengaruhi hasil penelitian. Struktur ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, produktivitas lahan, harga komoditas, serta permintaan pasar. Dengan demikian, dinamika pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan fiskal pemerintah daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi dan sektoral yang berada di luar ruang lingkup penelitian ini.

Hasil penelitian ini dapat dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah dikaji pada Bab II. Badrudin dan Kuncorojati (2017) menyatakan bahwa peningkatan kemandirian fiskal daerah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, Putra dan Yasa (2019) menemukan bahwa PAD dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil serupa juga dilaporkan oleh Tuwo, Rotinsulu, dan Kawung (2021) yang menunjukkan bahwa PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, Makawaehe, Walewangko, dan Sumual (2023) menyimpulkan bahwa PAD dan Belanja Modal memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi

Selatan. Sementara itu, Saputra, Haliah, dan Indrijawati (2021) menunjukkan bahwa Belanja Modal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Meskipun sebagian besar penelitian terdahulu menunjukkan adanya pengaruh positif PAD dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi, hasil penelitian ini memberikan gambaran yang berbeda. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan fiskal sangat dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing daerah. Pada Kabupaten Gorontalo, peningkatan PAD belum cukup besar untuk meningkatkan kapasitas fiskal secara signifikan, sedangkan Belanja Modal belum sepenuhnya diarahkan atau belum memiliki waktu yang cukup untuk menghasilkan dampak ekonomi yang optimal. Selain itu, terdapat berbagai faktor lain seperti investasi swasta, kualitas sumber daya manusia, tingkat penyerapan tenaga kerja, perkembangan teknologi, inflasi, konsumsi rumah tangga, serta stabilitas ekonomi yang turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi, namun tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak menunjukkan bahwa PAD dan Belanja Modal tidak memiliki peran dalam pembangunan ekonomi daerah. Sebaliknya, temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan daerah maupun alokasi Belanja Modal, tetapi juga oleh efektivitas pengelolaan, ketepatan sasaran program, sinergi antar kebijakan pembangunan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo perlu terus meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, memperbaiki kualitas Belanja Modal agar lebih berorientasi pada sektor-sektor produktif, serta mendorong investasi dan pengembangan sektor unggulan daerah sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat secara berkelanjutan.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kebijakan fiskal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo selama periode 2015–2025, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai representasi sisi penerimaan dan Belanja Modal sebagai representasi sisi pengeluaran daerah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kebijakan fiskal daerah dari sisi penerimaan yang direpresentasikan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo. Meskipun koefisien regresi menunjukkan arah hubungan yang positif, hasil uji parsial menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD selama periode penelitian belum diikuti oleh perubahan pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat untuk menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik.
2. Kebijakan fiskal daerah dari sisi pengeluaran yang direpresentasikan melalui Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo. Koefisien regresi menunjukkan arah hubungan yang positif, tetapi hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan Belanja Modal selama periode penelitian belum menunjukkan keterkaitan langsung yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo. Manfaat pengeluaran modal dimungkinkan memerlukan waktu untuk tertransmisikan melalui peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, produktivitas, dan aktivitas ekonomi daerah.
3. Kebijakan fiskal daerah yang direpresentasikan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi pertumbuhan ekonomi, sedangkan sebagian besar variasinya belum dapat dijelaskan oleh model penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas penerimaan daerah

dan alokasi Belanja Modal belum dengan sendirinya menghasilkan perubahan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dengan demikian, dinamika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo dapat berkaitan dengan faktor-faktor lain di luar PAD dan Belanja Modal yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo, optimalisasi PAD sebaiknya tidak hanya diarahkan pada peningkatan besaran penerimaan, tetapi juga pada penguatan pemanfaatan kapasitas fiskal untuk membiayai program pembangunan yang produktif. Pada sisi pengeluaran, alokasi Belanja Modal perlu semakin diarahkan pada infrastruktur dan fasilitas publik yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan produktivitas, konektivitas wilayah, pelayanan publik, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini penting karena hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan PAD dan Belanja Modal selama periode penelitian belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Bagi pemangku kebijakan daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bahwa efektivitas kebijakan fiskal tidak semata-mata ditentukan oleh peningkatan penerimaan dan besarnya Belanja Modal, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, ketepatan sasaran, efektivitas pelaksanaan, dan keterkaitan pengeluaran pemerintah dengan sektor-sektor produktif daerah. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan penerimaan dan pengeluaran perlu diperkuat agar kapasitas fiskal daerah dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai kebijakan fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi dapat dikembangkan dengan memasukkan variabel fiskal maupun ekonomi lainnya, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), investasi, inflasi, tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), atau variabel lain yang secara teoretis berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian selanjutnya juga dapat memperpanjang periode observasi, memperluas cakupan wilayah, atau menggunakan pendekatan data panel sehingga

dinamika pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dianalisis secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo. (2026). Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo Tahun 2025. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Kabupaten Gorontalo dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Gorontalo. https://gorontalokab.bps.go.id

Badrudin, R., & Kuncorojati, I. (2017). The effect of district own-source revenue and fiscal balance funds on regional economic growth in Indonesia. Economic Journal of Emerging Markets, 9(2), 197-206. https://doi.org/10.20885/ejem.vol9.iss2.art8

Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (Eds.). (1998). *Fiscal decentralization in developing countries*. Cambridge University Press.

Canavire-Bacarreza, G., Martinez-Vazquez, J., & Vulovic, V. (2020). Fiscal decentralization and economic growth: An updated review of empirical evidence. Dalam J. Martinez-Vazquez & F. Vaillancourt (Eds.), Fiscal Decentralization and Local Finance in Developing Countries. Edward Elgar Publishing.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). *Portal Data APBD Pemerintah Daerah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://djpk.kemenkeu.go.id

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2026). Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD): Realisasi APBD Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2015-2025. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS* 26 (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill Education.

Halim, A. (2020). *Manajemen keuangan sektor publik: Problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Salemba Empat.

Makawaehe, T. A., Walewangko, E. N., & Sumual, J. I. (2023). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(3).

Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (2003). Fiscal decentralization and economic growth. World Development, 31(9), 1597-1616. https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00109-8

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (5th ed.). McGraw-Hill.

Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. Journal of Economic Literature, 37(3), 1120-1149. https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120

Putra, I. N. A., & Yasa, I. N. M. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 8*(12), 2836-2865.

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. https://peraturan.bpk.go.id

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. https://peraturan.bpk.go.id

Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy, 98*(5), S71-S102. https://doi.org/10.1086/261725

Saputra, M. R., Haliah, & Indrijawati, A. (2021). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening. Akrual: *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer, 14*(2). https://doi.org/10.26487/akrual.v14i2.14810

Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). *Research methods for business: A skill-building approach* (8th ed.). John Wiley & Sons.

Smith, A. (2007). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. MetaLibri. (Karya asli diterbitkan tahun 1776).

Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94. https://doi.org/10.2307/1884513

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Economic development* (13th ed.). Pearson.

Tuwo, M. A., Rotinsulu, T. O., & Kawung, G. M. V. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah.

Tuwo, R. D., Rotinsulu, D. C., & Kawung, G. M. V. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(4).

Lampiran 1.

DAFTRA RIWAYAT HIDUP



Aip Pratikto Hunowu lahir di Bilungala pada 17 April 1984. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, pasangan almarhum Abd. Rahman Hunowu dan Sumiaty Putu. Penulis menikah dengan Suryan Buntuang dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Moh. Alfarrezal Raditya Hunowu dan Aisyah Revhallina Hunowu.

Penulis memulai pendidikan formal di SDN Inpres Bonepantai, yang saat ini bernama SDN 10 Bonepantai, dan menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 1997. Pendidikan selanjutnya ditempuh di SMP Negeri 1 Bonepantai dan diselesaikan pada tahun 2000. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan melalui Program Paket C yang setara dengan jenjang SMA/SMK/MA dan menyelesaikannya pada tahun 2008.

Dalam perjalanan kariernya, penulis saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Balai Wilayah Sungai Sulawesi Gorontalo. Di tengah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah, penulis melanjutkan pendidikan tinggi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

Sebagai bagian dari penyelesaian pendidikan pada jenjang sarjana, penulis menyusun hasil penelitian berjudul “Pengaruh Kebijakan Fiskal Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo.” Penelitian tersebut mengkaji kebijakan fiskal daerah yang direpresentasikan melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai sisi penerimaan dan Belanja Modal sebagai sisi pengeluaran dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo.

Lampiran 2.

DATA SEKUNDER

Tahun	PAD (Miliar Rp)	Belanja Modal (Miliar Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2015	113,22	192,55	6,53
2016	125,27	192,89	6,60
2017	190,43	157,77	6,78
2018	147,99	281,06	6,20
2019	155,47	254,33	6,22
2020	128,16	167,35	-0,01
2021	122,47	353,57	2,43
2022	128,46	300,98	3,94
2023	144,90	176,91	4,51
2024	164,77	170,39	4,11
2025	**190,27**	**100,33**	**5,35**

Lampiran 3. Output SPSS

```
DESCRIPTIVES VARIABLES=X1 X2 Y
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
```

Descriptives

Notes

Output Created		21-JUL-2026 13:32:17
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	11
Missing Value Handling	Definition of Missing	User defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	All non-missing data are used.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=X1 X2 Y /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Resources	Processor Time	00:00:00,00
	Elapsed Time	00:00:00,01

[DataSet0]

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	11	113.22	190.43	146.4918	26.57480
Belanja Modal	11	100.33	353.57	213.4664	74.57068
Pertumbuhan Ekonomi	11	-.01	6.78	4.7873	2.10910
Valid N (listwise)	11				

```
NPAR TESTS
  /K-S(NORMAL)=X1 X2 Y
  /MISSING ANALYSIS.
```

NPar Tests

Notes

Output Created		21-JUL-2026 13:36:24
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	11
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each test are based on all cases with valid data for the variable(s) used in that test.
Syntax		NPAR TESTS /K-S(NORMAL)=X1 X2 Y /MISSING ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00:00:00,00
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Number of Cases Allowed[a]	524288

a. Based on availability of workspace memory.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PAD	Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi
N		11	11	11
Normal Parameters[a,b]	Mean	146.4918	213.4664	4.7873
	Std. Deviation	26.57480	74.57068	2.10910
Most Extreme Differences	Absolute	.206	.245	.203
	Positive	.206	.245	.172
	Negative	-.132	-.137	-.203
Test Statistic		.206	.245	.203
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]	.064[c]	.200[c,d]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

```
REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COLLIN TOL
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT Y
  /METHOD=ENTER X1 X2.
```

Regression

Notes

Output Created		21-JUL-2026 13:38:52
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	11
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
Syntax		REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COLLIN TOL /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT Y /METHOD=ENTER X1 X2.
Resources	Processor Time	00:00:00,02
	Elapsed Time	00:00:00,01
	Memory Required	2896 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	0 bytes

Variables Entered/Removed[a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Belanja Modal, PAD[b]	.	Enter

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi
b. All requested variables entered.

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PAD	.712	1.404
	Belanja Modal	.712	1.404

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Collinearity Diagnostics[a]

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	PAD	Belanja Modal
1	1	2.894	1.000	.00	.00	.01
	2	.099	5.406	.00	.07	.45
	3	.007	20.029	.99	.93	.55

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

```
REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COLLIN TOL
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT Y
  /METHOD=ENTER X1 X2
  /SAVE RESID.
```

Regression

Notes

Output Created		21-JUL-2026 13:40:56
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	11
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
Syntax		REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COLLIN TOL /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT Y /METHOD=ENTER X1 X2 /SAVE RESID.
Resources	Processor Time	00:00:00,03
	Elapsed Time	00:00:00,03
	Memory Required	2912 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	0 bytes
Variables Created or Modified	RES_1	Unstandardized Residual

Variables Entered/Removed[a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method

1	Belanja Modal, PAD[b]	.	Enter

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

b. All requested variables entered.

. Dependent
Variable:
Pertumbuhan
Ekonomi

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PAD	.712	1.404
	Belanja Modal	.712	1.404

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Collinearity Diagnostics[a]

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	PAD	Belanja Modal
1	1	2.894	1.000	.00	.00	.01
	2	.099	5.406	.00	.07	.45
	3	.007	20.029	.99	.93	.55

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Residuals Statistics[a]

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3.8910	5.9067	4.7873	.67392	11

Residual	-4.27676	2.63903	.00000	1.99854	11
Std. Predicted Value	-1.330	1.661	.000	1.000	11
Std. Residual	-1.914	1.181	.000	.894	11

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

```
COMPUTE ABS_RES=ABS(RES_1).
EXECUTE.
REGRESSION
 /MISSING LISTWISE
 /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
 /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
 /NOORIGIN
 /DEPENDENT ABS_RES
 /METHOD=ENTER X1 X2.
```

Regression

Notes

Output Created		21-JUL-2026 13:43:59
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	11
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.

Syntax		REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT ABS_RES /METHOD=ENTER X1 X2.
Resources	Processor Time	00:00:00,02
	Elapsed Time	00:00:00,01
	Memory Required	2976 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	0 bytes

Variables Entered/Removed[a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Belanja Modal, PAD[b]	.	Enter

a. Dependent Variable: ABS_RES

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.677[a]	.458	.322	.98658

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, PAD

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.576	2	3.288	3.378	.086[b]
	Residual	7.787	8	.973		
	Total	14.362	10			

a. Dependent Variable: ABS_RES

b. Predictors: (Constant), Belanja Modal, PAD

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.410	2.770		3.036	.016
	PAD	-.036	.014	-.800	-2.595	.032
	Belanja Modal	-.007	.005	-.465	-1.509	.170

a. Dependent Variable: ABS_RES

```
REGRESSION
 /MISSING LISTWISE
 /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
 /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
 /NOORIGIN
 /DEPENDENT Y
 /METHOD=ENTER X1 X2
 /RESIDUALS DURBIN.
```

Regression

Notes

Output Created		21-JUL-2026 13:48:11
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	11
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
Syntax		REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT Y /METHOD=ENTER X1 X2 /RESIDUALS DURBIN.
Resources	Processor Time	00:00:00,02
	Elapsed Time	00:00:00,01
	Memory Required	2992 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	0 bytes

Variables Entered/Removed[a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Belanja Modal, PAD[b]	.	Enter

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

b. All requested variables entered.

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.320[a]	.102	-.122	2.23443	1.036

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, PAD

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.542	2	2.271	.455	.650[b]
	Residual	39.942	8	4.993		
	Total	44.483	10			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

b. Predictors: (Constant), Belanja Modal, PAD

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.747	6.273		.119	.908
	PAD	.026	.032	.333	.840	.425
	Belanja Modal	.001	.011	.027	.069	.947

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Residuals Statistics[a]

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3.8910	5.9067	4.7873	.67392	11
Residual	-4.27676	2.63903	.00000	1.99854	11
Std. Predicted Value	-1.330	1.661	.000	1.000	11
Std. Residual	-1.914	1.181	.000	.894	11

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Lampiran 4. SK Dosen Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
NOMOR : 095/FIS-UMGO/D/KEP/2025
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
DI FAKULTAS ILMU SOSIAL

Menimbang :
a. Bahwa untuk kelancaran pembimbingan penelitian di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo, maka dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing Skripsi.
b. Bahwa untuk kepentingan dictum pertama di atas dipandang perlu menerbikan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

Mengingat :
1. Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 234/U/O/2000 tentang pedoman perguruan tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 98/D/O/2008 tentang izin operasional Program studi dan pendirian Universitas Muhammadiyah Gorontalo.
6 Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI. Nomor 108/DIKTI/Kep/2000 tentang pedoman pembukaan program studi atau jurusan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang pedoman pendirian Perguruan Tinggi.
7. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 19/SK-PP/III.B/I.a/1999 tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Staluta Universitas Muhammadiyah Gorontalo
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo tentang pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gorontalo

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.

Pertama : Mengangkat dan menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

No	Nama Dosen	Keterangan
1.	Joice Machmud, SE., M.M	Pembimbing I
2.	Sri Hantuti Paramata, SE., M.Pd	Pembimbing II

Dalam penyusunan Skripsi bagi mahasiswa :

Nama : Alp Praktikto Hunowu

NIM : D01425008

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Kedua : Judul Proposal ***"Dampak Kebijakan Fiskal Daerah terhadap Pembangunan Ekonomi Lokal"***

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal : 15 Desember 2025 M
24 Jumadil Akhir 1447 H

Dekan

Dr. Apris Ara Tilome, S.Ag., M.Si
NBM. 735403

Tembusan Yth :

1. *Para Kaprodi*
2. *Para Pembimbing*
3. *Mahasiswa Ybs*
4. *Arsip*

Lampiran 5. Surat Permohonan Ijin Penelitian

FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
Alamat : Jln.Prof.Dr. H. Mansoer Pateda Pentadio Timur Kab. Gorontalo.
Website: Fis.umgo.ac.id

Prodi : Administrasi Publik
Prodi : Akuntansi
Prodi : Ekonomi Pembangunan
Prodi : Sastra Inggris
Prodi : Sastra Arab
Prodi : Hukum
Prodi : Pariwisata

Nomor : 003/FIS-UMGO/REK/B/2026
Lamp : -
Hal : ***Permohonan Rekomendasi Penelitian***

Gorontalo, 12 Februari 2026 M
24 Sya'ban 1447 H

Kepada Yth,
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Gorontalo
Di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo maka perlu melaksanakan penelitian, untuk maksud tersebut kami bermohon kepada Bapak/Ibu dapat memberikan izin untuk memberikan data terkait penelitian skripsi kepada mahasiswa/i yang tercantum dibawah ini :

Nama	:	Aip Pratikto Hunowu
NIM	:	D01425008
Program Studi	:	S1 Ekonomi Pembangunan
Judul Penelitian	:	Dampak Kebijakan Fiskal Daerah terhadap Pembangunan Ekonomi Lokal di Kabupaten Gorontalo
Lokasi Penelitian	:	Kab. Gorontalo

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mengetahui,
Wakil Dekan

Dr. Robin Pakudu, S.Sos., M.Si
NBM. 1079188

Lampiran 6. Rekomendasi Penelitian/Kesbangpol

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. ACHMAD A. WAHAB NO 65 TELP. 0435 (881060)
LIMBOTO

REKOMENDASI
Nomor :074 /BKBP/152/II/2026

Berdasarkan Surat Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo Nomor : 003/FIS-UMGO/REK/B/2026 tanggal 12 Februari 2026 Perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian. Dengan ini kami memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	**AIP PRATIKTO HUNOWU**
Nim	:	D01425008
Jenis Kelamin	:	Laki - laki
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
No. Handphone	:	0822-7144-7378
Email	:	reza46.rh@gmail.com
Alamat	:	Desa Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo
Maksud	:	Melaksanakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Dengan Judul **"Dampak Kebijakan Fiskal Daerah terhadap Pembangunan Ekonomi Lokal di Kabupaten Gorontalo"**
Lokasi	:	Wilayah Kabupaten Gorontalo
Waktu	:	Tanggal 18 Februari 2026 s/d 18 Juni 2026

Dalam melakukan kegiatan agar menjaga keamanan dan ketertiban, serta melapor kepada Kepala Badan/Dinas terkait.

Demikian Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan selesai mengadakan kegiatan agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Gorontalo Cq. Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Gorontalo.

Dikeluarkan di : Limboto
Pada Tanggal : 18 Februari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

HARLAN GOBEL, SIP

Tembusan Yth :
1. Bupati Gorontalo
2. Wakil Bupati Gorontalo
3. Kepala Badan / Dinas / Kantor Se-Kab. Gorontalo
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip.

Catatan:
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

Lampiran 7. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. Kol Rauf Mo'o Nomor 357 Telp. 880593-882142 Limboto Kode Pos 96211
E-Mail : badankeuangankabgor@gmail.com Website : http://bkad.gorontalokab.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
NOMOR : 900/BKAD/053/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo menerangkan bahwa :

N a m a	:	AIP PRATIKTO HUNOWU
NIM	:	D01425008
Perguruan Tinggi	:	Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Lokasi Penelitian	:	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo
Judul Skripsi	:	"Dampak Kebijakan Fiskal Daerah terhadap Pembangunan Ekonomi Lokal di Kabupaten Gorontalo".

Bahwa nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dari tanggal 18 Februari s/d 18 Juni 2026 dengan judul "Dampak Kebijakan Fiskal Daerah terhadap Pembangunan Ekonomi Lokal di Kabupaten Gorontalo".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Limboto, 22 Juni 2026
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

HARIYANTO MANAN, SE., M.Si
Pembina Tkt.1 / Ivb
NIP. 198304112007011002

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS	
KABUBAG / JABATAN FUNGSIONAL	
PELAKSANA	

Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian



